

## **BAB 4**

### **KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI TEMA PAMERAN**

Sebagaimana uraian pada bagian sebelumnya tentang konsep museum kota serta evaluasi terhadap kondisi umum Museum Kota Makassar, maka dibutuhkan sebuah konstruksi baru terhadap pengelolaan Museum Kota Makassar. Oleh karena permasalahan penelitian ini difokuskan pada konsep tematik pameran, terlebih dahulu dibahas tentang karakteristik pertumbuhan Kota Makassar. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai tahap pengumpulan ide untuk memperoleh pemahaman tentang sejarah perkembangan Kota Makassar. Tahap pengumpulan ide atau gagasan sebagaimana dikemukakan oleh Dean (2007), merupakan tahap awal dalam merancang sebuah pameran atau disebut sebagai tahap konseptualisasi (Wanny Rahardjo dan Irmawati Johan, 2009: 108).

Demikian, pembahasan tentang karakteristik Kota Makassar berikut ini dibagi atas tiga sub pembahasan, yaitu: awal pertumbuhan kota; karakteristik budaya, kehidupan sosial dan demografi; serta struktur tata ruang kota. Pembagian pada sub pembahasan ini didasarkan pada bentuk pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah kota, yaitu aspek sosial-budaya dan aspek fisik. Dalam hal ini, upaya mendefinisikan sebuah kota sebagaimana disebutkan oleh Max Hebditch (1995), merupakan hal penting pertama yang harus dilakukan oleh museum kota. Sementara itu, sub pembahasan tentang awal pertumbuhan kota dimaksudkan sebagai pengantar untuk memberikan pemahaman tentang sejarah terbentuknya Kota Makassar.

#### **4.1 Awal Pertumbuhan Kota**

Tradisi lisan menyebutkan bahwa kata “Makassar” berasal dari kata “*Makassaraki Nabbiya*”, yang berarti Nabi menampakkan/menjelmaan diri (Mattulada, 1982:43). Kata “Makassar” sendiri memiliki berbagai macam persepsi, beberapa pendapat dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menyebut Makassar sebagai grup etnis atau suku Makassar (Mattulada, 1982:14), Makassar sebagai nama sebuah kerajaan kembar Gowa-Tallo (ibid:18 dan Nasaruddin Koro,

2005:82) serta menyebut Makassar dalam pengertian kota baik ketika pusat kekuasaan masih berada di Sombaopu (Gowa-Tallo) (Reid, 2009:75) maupun ketika pusat kekuasaan berpindah ke benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam (Belanda). Penggunaan kata Makassar juga melekat pada penamaan selat yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, serta pulau di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sejarah Kota Makassar tidak lepas dari sejarah Kerajaan Gowa-Tallo dengan Somba Opu sebagai pusat kerajaan dan menjadi bandar yang ramai pada awal abad ke-16. Sebelum masa tersebut, tidak ada catatan yang menyebut tentang wilayah ini hingga abad 13, barulah pada abad ke-14 sebuah kitab yang ditulis oleh Mpu Prapanca yang disebut Negara-Kertagama memuat tentang Makassar. Keterangan-keterangan yang disajikan pada kitab tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu, Gowa belum berwujud sebagai kerajaan. Ketika Gowa telah berkembang menjadi suatu kerajaan, maka sebagai kerajaan maritim pangkalan armada niaganya berpusat di *Maccini Sombala* muara sungai Jeneberang sampai ke utara, antara sungai Jeneberang dan sungai Tallo (Mattulada, 1982). Di sepanjang pesisir inilah disebut sebagai pelabuhan bebas Kerajaan Makassar yang saat ini dikenal sebagai Kota Makassar (Mattulada, 1982 dan Reid, 2009:75).

Catatan tentang awal kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan terdapat dalam epos *La Galigo*, merupakan perpaduan antara tradisi lisan dan tulisan yang menghasilkan sebuah karya sastra terbesar di dunia. Karya sastra tersebut memuat tentang kisah *To Manurung* sebagai penguasa kerajaan-kerajaan tertua di Sulawesi Selatan (Pelras, 2006: 4). Sementara itu, catatan awal tentang daerah Sulawesi Selatan yang ditulis berdasarkan kesaksian bangsa Eropa berasal dari orang-orang Portugis yang mengunjungi daerah ini, yaitu Antonio de Paiva pada tahun 1542-1543 dan 1544, serta Manuel Pinto pada tahun 1545 dan 1548. Kedua orang tersebut, memberikan catatan kesaksiannya tentang kondisi umum daerah Sulawesi Selatan khususnya daerah *Suppa*, *Sidenreng*, dan *Siang* yang merupakan daerah penting sebelum munculnya Kerajaan Gowa-Tallo yang kelak dikenal sebagai Makassar (Pelras, 1983: 59). Catatan tentang Makassar pertama kali bersumber dari orang-orang Belanda pada awal abad ke-17 tentang kondisi alam Makassar dan sekitarnya yang menyebutkan bahwa:

Daerah Makassar dari laut terlihat sebagai daerah yang paling subur dan yang paling menyenangkan. Daerah berupa dataran, indah dan hijau, tidak begitu tertutup hutan seperti daerah-daerah lain di Hindia; penduduknya pun sangat padat”. “Makassar adalah daerah persawahan yang indah, di mana-mana padi itu tumbuh; hal ini dapat dilihat jika berlayar menyusuri pantai, terutama dalam bulan Maret, April, Mei dan Juni. Pada bulan-bulan itu padi belum dituai.... Lebih ke dalam lagi, terdapat perkebunan kelapa yang indah. Pohon-pohonnya ditanam berjajar-jajar dengan teratur dan daunnya yang rindang itu melindungi orang-orang dari teriknya matahari... (Pelras, 1983: 60).

Tentang jumlah penduduk, catatan Gervaise (1688), menyebut bahwa penduduk Makassar sekitar tahun 1600 adalah 160.000 jiwa (Supratikno Rahardjo, 2007: 101 dan Reid, 2009: 76). Jumlah tersebut menurut Reid (2009), adalah penduduk pria yang siap mengangkat senjata, jumlah seluruhnya diperkirakan 400.000 jiwa. Sementara itu, berdasarkan catatan Foster yang menyebut kepadatan rumah tidak lebih dari 10 rumah per *ekar* (0,46 ha). Berdasarkan asumsi tersebut, Anthony Reid (2009), memprakirakan jumlah penduduk Makassar tumbuh dari populasi hanya beberapa ribu pada tahun 1590-an menjadi sekitar 25.000 jiwa pada tahun 1615 dan mencapai angka 100.000 pada tahun 1640-1660. Jumlah ini menjadikan Makassar salah satu dari enam kota terbesar di Asia Tenggara, dan sama besarnya dengan banyak ibukota di Eropa (Reid, 2009: 95-96). Sementara itu, bentuk fisik kota dijelaskan oleh Foster (1905), bahwa:

... pada masa puncak kejayaan terbentang sepanjang daerah pantai yang membentuk Makassar masa kini, dari Ujung Tana di utara melewati benteng Sombaopu hingga Panakukang di selatan – dengan panjang lebih dari 10 kilometer. Meski kampung-kampung yang membentuk kota jarang yang mencapai lebih dari satu kilometer ke pedalaman, dan kepadatan rumah tidak lebih dari 10 rumah per *ekar* (0,46 ha) pada lahan yang dibeli pedagang Inggris pada tahun 1613 (Reid, 2009: 77).

Makassar tumbuh sebagai kerajaan besar setelah adanya penyatuan antara dua kerajaan yaitu Kerajaan Gowa yang berpusat di sekitar sungai Jeneberang dan Kerajaan Tallo yang berpusat di sekitar sungai Tallo. Setelah penyatuan dua kerajaan tersebut, pada masa kekuasaan Raja Gowa X *Tunipalangga Ulaweng* wilayah ini kemudian diperkuat dengan perbentengan yang dibangun di sepanjang pesisir antara sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Benteng-benteng tersebut dimaksudkan sebagai pengawal benteng Somba Opu yang menjadi pusat kerajaan.

Hubungan dagang antara Makassar dengan pedagang-pedagang Islam (pedagang Melayu dan Arab) berpengaruh pada Kerajaan Makassar. Masuknya agama Islam di wilayah ini diantaranya dibawa oleh pedagang-pedagang tersebut, serta adanya utusan khusus dari wilayah lain untuk menyebarkan agama Islam. Tercatat diantaranya; Raja Ternate tiba di Makassar pada tahun 1580 untuk memperkenalkan Islam kepada Raja Gowa; serta utusan khusus Sultan Johor yang mengirim tiga ulama ke wilayah ini. Islam kemudian diterima oleh kalangan setempat, dan pada tanggal 22 September 1605, Raja Tallo yang sekaligus menjabat Mangkubumi Kerajaan Makassar mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian bergelar Sultan Awaluddin, disusul kemudian oleh Raja Gowa yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Islam kemudian diterima secara resmi dengan adanya deklarasi yang menetapkan sebagai agama resmi kerajaan pada tanggal 9 November 1607. Ligvoet (1880), menyebut bahwa shalat Jum'at pertama diadakan di Tallo pada tanggal tersebut (Nasaruddin Koro, 2005:80-82). Peristiwa inilah kemudian dijadikan dasar penetapan hari jadi Kota Makassar.



Foto 4.1 Situasi dan Kondisi Pusat Kerajaan Somba Opu  
Sekitar Abad ke-16

Sumber: Koleksi Museum Kota Makassar

Pertumbuhan Kerajaan Makassar sebagai bandar niaga ditandai dengan berdirinya pusat kerajaan di *Somba Opu* yang dikelilingi perkampungan yang disebut *Mangalekanna*, dan di sekitar benteng inipula berdiri kantor-kantor dagang sekaligus menjadi tempat tinggal yang disebut *Bontoala* (Mattulada, 1982). Seiring pertumbuhan Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim maka tumbuh pula pelabuhan yang menjadi pusat pedagang-pedagang Nusantara, Arab, Cina dan Eropa. Pedagang Melayu menjadikan wilayah ini sebagai pusat perdagangan pada pertengahan abad ke-16, dan sejak awal abad ke-17 Makassar menjadi titik komersial (Reid, 2009: 75). Dukungan penuh yang diberikan oleh komunitas Melayu ditandai dengan perpindahan pusat perdagangan dari Siang (terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan serta bagian utara Makassar) sejak tahun 1550, dukungan serupa juga datang dari bangsa Portugis yang mulai menetap di Makassar pada tahun 1580 (Pelras, 2006: 157). Kemudian diikuti oleh Spanyol yang mengunjungi kota ini sejak awal abad ke-17, bahkan para pedagang Eropa menempatkan wakil dagang, diantaranya: Inggris pada tahun 1613, dan Denmark pada tahun 1618. Sementara itu, pedagang Perancis tiba pada tahun 1622, pedagang Cina pada tahun 1619, dan Kerajaan Golconda (India Selatan) menempatkan wakil dagang pada tahun 1650. Selain perdagangan utama menyediakan rempah kepada pembeli Eropa, India dan Cina, Makassar menjadi salah satu pintu masuk Asia Tenggara di mana barang-barang Cina dan Perak Meksiko bisa dipertukarkan dengan barang-barang dari India berupa kain (Reid, 2009: 75-76). Selain hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Melayu dan Eropa, Makassar juga mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, yaitu Banjarmasin, Demak, Pulau Timor, dan khususnya Ternate dan Banda (Pelras, 2006: 157 dan 163). Hubungan khusus dengan Ternate dan Banda yang merupakan pusat produksi rempah-rempah pada saat itu, menjadikan bandar Makassar sebagai pusat perdagangan rempah-rempah.

Komoditi lain yang diperdagangkan di bandar Makassar pada saat itu, antara lain: beras dan kain lokal, lada dari Banjarmasin dan Jambi, serta budak yang merupakan tawanan perang (Pelras, 2006: 163). Hasil bumi lain yang diekspor dari daerah ini diantaranya kelapa, nila dan damar. Transaksi

perdagangan pada saat itu menurut catatan Antonio de Paiva, menyebutkan daftar harga yang berlaku pada tahun 1554, yaitu:

beras harganya setengah *cruzado* (mata uang yang dipakai di Malaka) sama dengan dua setengah *tangas* untuk dua setengah *camdins*, daging kerbau dua *cruzados*, babi setengah *tangas*, 60 ekor ayam satu *cruzado*, kambing satu *tangas*, Bahan pangan ini berlimpahan. Ikan pun banyak sekali hasilnya; terutama ikan sardin, 3000 ekor seharga setengah *cruzado*.... (Pelras, 1983: 61).

Christian Pelras (1983), menyebutkan bahwa dua setengah *tangas* sama dengan 150 real, dan *camdins* kurang lebih sama dengan 400 liter (Pelras, 1983: 81).



Foto 4.2 Kapal Jenis *Padewakkang*  
Sumber: Time Design, 2010

Sementara itu, menurut Couto (1779), jenis-jenis transportasi air yang digunakan di Sulawesi Selatan, baik untuk perdagangan maupun keperluan lain terdiri atas empat jenis, yaitu: *pelang*, yakni perahu besar bergeladak dengan dua cadik, lunas perahu adalah sampan dari sebatang kayu besar yang ditambah papan pada setiap sisinya. Jenis kedua berukuran kecil dan digunakan untuk mencari ikan dan perahu barang, yaitu *lopi* (sebutan umum perahu bagi suku Bugis), *biseang* (sebutan bagi suku Makassar) untuk mencari ikan sehingga sering disebut *pajala*. Jenis ketiga adalah *jojoga*, merupakan perahu dagang berukuran besar, kapal jenis ini memiliki sebutan *joncongan* bagi suku Makassar dan *joncongeng* bagi suku Bugis. Terakhir, *pangajavas* atau *pencaja'* (Bugis) atau *pancaja'* (Makassar), yaitu perahu layar ringan, panjang, dan lancip memilikir dua tiang layar serta dua puluh sampai tiga puluh pendayung (Pelras, 2006: 145). Jenis lain

yang disebutkan oleh Nasaruddin Koro (2006), adalah Pinisi, Padewakkang, Lambo, Soppe, dan Sandeq.

Stapel (1922), menyebut bahwa seiring dengan tumbuhnya Makassar sebagai bandar niaga yang menghubungkan wilayah timur nusantara sebagai pusat komoditi rempah-rempah dengan wilayah barat, peran ini kemudian menarik konflik kepentingan antara pihak asing (Portugis, Belanda, dan Inggris) dengan penguasa setempat (Reid, 2009:78). Konflik kepentingan mencapai puncaknya pada awal abad ke-17 antara Belanda (VOC) dengan penguasa setempat.



Foto 4.3 Perang Makassar 8 Juni 1660  
Sumber: VOC War Fare, 2010



Foto 4.4 Perang Makassar 12 Juni 1660  
Sumber: VOC War Fare, 2010

Belanda pada saat itu, menuntut kepada penguasa Makassar untuk menyerahkan monopoli perdagangan kepada mereka atas pedagang-pedagang asing khususnya bangsa Eropa. Konflik tersebut kemudian meningkat tahun 1660, pada masa kekuasaan Sultan Hasanuddin. Belanda yang menginginkan jalur penghubung dengan pusat rempah-rempah di Maluku memusatkan perhatiannya pada daerah ini. Memanfaatkan konflik lokal yang terjadi sebelumnya, Belanda kemudian bekerjasama dengan penguasa lokal lain untuk menyerang pusat kekuasaan *Sombaopu*. Bantuan yang datang dari Ternate, Buton, Mandar, dan kerajaan-kerajaan Bugis terutama Bone di bawah kepemimpinan Arung Palakka berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian *Bungaya* pada tanggal 18 November 1667 (Andaya, 2004). Berdasarkan perjanjian tersebut, pada tanggal 24 Juni 1669, Belanda menghancurkan dan memusnahkan Somba Opu sebagai pusat kerajaan. Belanda

kemudian memilih benteng Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan militer yang kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam (Mattulada, 1982).



Foto 4.5 Lukisan yang menggambarkan “Perang Makassar” pada tahun 1667.  
Sumber: Farelli, 2010

Keterlibatan Arung Palakka dalam perang tersebut sebagai salah satu penguasa kerajaan Bugis yaitu Bone dikarenakan berbagai latar belakang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dijelaskan oleh Leonard Y. Andaya (2004), bahwa Arung Palakka bertindak dengan maksud menegakkan *siri*’ atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa Gowa kepada leluhurnya (Andaya, 2004: 22). Ditambahkan pula bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk membebaskan negerinya (Bone) dari dominasi Gowa serta mengintegrasikan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan (Nasaruddin Koro, 2005: 188). Leonard Y. Andaya (2004), mengemukakan bahwa periode tersebut khususnya “perang Makassar” (1660-1667), tetap memengaruhi kehidupan politik lokal di Sulawesi Selatan. Ditambahkan bahwa “sepanjang pengetahuan tentang periode penting dalam sejarah Sulawesi Selatan itu belum dipahami dengan utuh, sulit kiranya untuk mengharapkan berakhirnya kontroversi tersebut” (Andaya, 2004: 2).



Keberhasilan Belanda menguasai daerah ini menandai era baru perkembangan Makassar. Faktor keamanan sebagai pertimbangan utama menyebabkan Belanda memusatkan segala aktivitasnya di Fort Rotterdam yang dibangun dengan memperkuat benteng peninggalan Kerajaan Makassar yaitu benteng Ujung Pandang. Sebuah era yang ditandai dengan kehidupan *intra muros* yaitu kehidupan yang memusatkan segala aktivitas di dalam benteng. Selanjutnya, Makassar berkembang sebagai salah satu kota kolonial di Indonesia, yang didominasi oleh kebijakan Pemerintah Belanda.

Perpindahan pusat aktivitas ini, praktis menghilangkan peran Somba Opu sebagai ibukota kerajaan pada saat itu dan di sisi lain mempertegas kehadiran Makassar sebagai sebuah kota yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh bangsa Eropa. Pengaruh tersebut tampak jelas pada struktur fisik tata ruang Kota Makassar sebagai kota kolonial. Meski demikian, karakteristik budaya dan kehidupan sosial etnis Bugis-Makassar sebagai etnis terbesar, masih mewarnai perkembangan Kota Makassar.

#### **4.2 Karakteristik Budaya, Kehidupan Sosial dan Demografi**

Karakteristik budaya penduduk Kota Makassar yang didominasi oleh etnis Bugis dan Makassar serta etnis lain yang ada di Sulawesi bagian selatan, masih terikat oleh norma-norma dan aturan adat yang disebut *pangadereng* (Bugis) atau *pangadakkang* (Makassar) yang mengatur watak, moral, dan sikap hidup (Nasaruddin Koro, 2005: 29). *Pangadereng* atau *pangadakkang* disebut sistem adat Bugis-Makassar yang terdiri dari lima pokok yakni ;

- a. *Ade'*, terdiri dari: *Ade' akkalabinengeng* atau norma mengenai perkawinan serta hubungan kekerabatan dan *ade' tana* atau norma mengenai bernegara;
- b. *Ade bicara*, hak-hak dan kewajiban seseorang untuk mengajukan kasus ke pengadilan;
- c. *Rapang*, dianggap keramat karena berwujud, seperti perumpamaan, kias atau analogi yang menganjurkan perbuatan dan etika dalam hidup;
- d. *Wari'*, susunan dalam hidup bermasyarakat untuk memelihara garis keturunan dan lapisan sosial dalam masyarakat; dan

- e. *Sara'* (hukum syariat), unsur pranata-pranata dan hukum Islam yang melengkapi keempat unsur sebelumnya (Mattulada, 1998: 25).

Norma dan aturan adat ini lahir dari falsafah hidup yang tercermin dari konsep *siri'* dan *pesse'* (Bugis) atau *siri' na pacce* (Makassar) (Nasaruddin Koro, 2005: 29). Istilah *siri'* adalah konsep yang mencakup gagasan tentang harga diri dan rasa malu, kedua gagasan ini tidak memiliki kontradiksi karena rasa malu secara implisit juga mengandung konsepsi rasa malu yang merupakan asal munculnya harga diri. Istilah *siri'* digunakan untuk menandakan seseorang telah dibuat malu (dipermalukan), sehingga perbuatan yang membuat rasa malu adalah tindakan yang mengabaikan konsepsi tentang martabat dan harga diri. Dalam keadaan seperti itu, orang yang telah dibuat *siri'* akan melakukan sesuatu untuk memulihkan kembali harga diri yang ternodai dengan menagihnya pada pihak yang mencorengnya (Andaya, 2004: 21).

Istilah *pesse'/pacce* merujuk kepada kepercayaan terhadap kesatuan spritual seluruh individu di dalam satu komunitas tertentu, sehingga ikatan spritual telah ada di antara anggota komunitas tertentu dan kepercayaan bersama terhadap yang melindungi seluruh komunitas. Konsepsi *pesse'/pacce* juga mempunyai kesamaan dengan konsep tentang *siri'*, karena pada tingkat biasa *pesse'/pacce* berarti "rasa pedih", tapi juga mempunyai pengertian lain yaitu "rasa simpati", empati terhadap kawan. Emosi *pesse'/pacce* inilah yang mengikat seorang Bugis atau Makassar pada komunitasnya, sehingga seseorang juga dapat menampakkan *pesse'/pacce* kepada komunitasnya yang sedang menderita meski tidak terkena dampak langsung. Dalam konteks inilah *siri'*, perasaan empati dan simpati atau *pesse'/pacce* meminta tindakan untuk menghilangkan penyebab kesukaran (Andaya, 2004: 21).

Keterkaitan kedua konsepsi tersebut dapat dilihat pada tindakan merusak *siri'* terhadap seseorang menciptakan situasi *pesse'/pacce*. Tekanan *pesse'/pacce* komunitas terhadap seseorang yang telah dibuat *siri'*, atau dipermalukan dapat memaksa seseorang untuk mengambil langkah dalam situasi seperti itu. Dalam konteks inilah, Leonard Y. Andaya (2004), menjelaskan tindakan Arung Palakka

yang berusaha menegakkan *siri'* komunitasnya dengan melakukan perlawanan terhadap Sultan Hasanuddin (Andaya, 2004: 22).

Keterikatan kedua konsep ini, dijelaskan pula oleh Hamid Abdullah (1985), bahwa *siri'* membawa masyarakat ke dalam interaksi sosial. Konsep *siri'* terikat oleh *pešé* (perih), berarti daya dorong yang kuat untuk mengambil tindakan *siri'* (harga diri). *Pešé* meliputi prinsip solidaritas yang tumbuh dari karakter pribadi yang memiliki *getteng* (keteguhan), *lempu'* (kejujuran), *acca* (kecerdasan), dan *warani* (keberanian) (Hamid Abdullah, 1985). Falsafah hidup inilah yang dipegang oleh manusia Bugis-Makassar untuk menegakkan *siri'*, sehingga selalu berusaha untuk teguh, jujur, cerdas dan berani dalam kehidupan bermasyarakat baik ketika berada di dalam komunitasnya maupun di luar komunitasnya. Sementara itu, Mattulada (1998) mengemukakan tiga hal tentang konsep *siri'* yakni:

- a. *Siri' emmi ri onroang ri lino*, artinya hanya dengan *siri'* orang hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberikan identitas sosial dan martabat kepada seseorang;
- b. *Mate ri siri' na*, artinya mati dalam *siri'* atau mati untuk menegakkan martabat diri, yang dianggap satu hal yang terpuji dan terhormat; dan
- c. *Mate siri'*, artinya orang yang sudah kehilangan martabatnya adalah bangkai hidup. Demikian halnya, orang Bugis-Makassar yang *mate siri'* akan melakukan *jallo'* (amuk) hingga ia mati sendiri. *Jallo'* yang demikian ini disebut *napatettongi siri' na* atau *napaentengi siri' na* artinya ditegakkan kembali martabat dirinya.

Karakteristik lain tentang masyarakat Bugis-Makassar sebagaimana dijelaskan Mohd. Ali Fadillah (2000), dengan mengutip pendapat Christian Pelras (1998), dalam menjelaskan proses modernitas manusia Bugis-Makassar dan etnis lain yang mendiami wilayah Sulawesi bagian selatan, menyebutkan bahwa terdapat tujuh elemen yang dimiliki oleh manusia Bugis Makassar, yaitu: pemikiran rasional, peningkatan aktivitas produksi, spesialisasi keahlian, keluasan komunikasi, keterbukaan budaya, hubungan sosial, dan keutamaan individual (Moh. Ali Fadillah, 2000:130). Kesaksian utama elemen pertama adalah tradisi

tulisan yang memuat pengetahuan tradisional dan kemampuan inovasi dengan mengadopsi pengetahuan dari luar untuk memperkuat pengetahuan tradisional yang dimiliki sebelumnya, salah satu contohnya adalah teknologi pembuatan kapal. Elemen kedua dan ketiga tampak pada bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan peningkatan barang-barang yang datang dari luar yang masuk ke wilayah ini melalui jalur perdagangan serta berbagai keahlian produksi yang merupakan tradisi yang masih berlanjut hingga saat ini. Elemen keempat merupakan fakta sosial yang menunjukkan kemampuan mereka menjelajahi bahkan menguasai jaringan maritim yang meningkat sejak periode akhir abad XVI hingga awal abad XVII. Elemen kelima tampak pada penerimaan Islam sebagai agama baru yang diperkenalkan oleh orang-orang Melayu melalui jaringan perdagangan. Elemen keenam tampak pada pertalian keluarga tidak hanya didasarkan pada pertalian darah, mobilitas sosial akan memunculkan pengakuan sosial serta melahirkan hubungan kekerabatan yang baru. Elemen terakhir tampak pada pengakuan hak-hak individual yang diaplikasikan pada suatu monarki konstitusional modern, hal ini terutama tampak pada peran dewan adat dalam melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemimpin di kalangan masyarakat Wajo (Moh. Ali Fadillah, 2000:130-136). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakteristik inilah yang menjadi identitas masyarakat Bugis-Makassar yang dapat ditampilkan oleh museum.

Sementara itu, karakteristik kehidupan sosial masyarakat Bugis-Makassar memiliki mobilitas yang cukup luwes, Mattulada (1998), mengutarakan bahwa pada masa kerajaan, masyarakat golongan elit tidak hanya ditempati oleh kaum bangsawan, tetapi juga oleh kaum *to maradeka* (orang merdeka) yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Selain *anak arung* (anak/keturunan bangsawan) juga terdapat; (1) *to panrita* (cendikawan agama) dan *to acca* (cendikiawan umum); (2) *to sugi*, yaitu orang kaya karena keuletan bekerja sehingga ia dapat menjadi orang terpandang dan mengatur kesejahteraan masyarakat pada umumnya; (3) *to warani*, yaitu pemberani yang senantiasa siap untuk tampil sebagai pembela negara dalam mempertahankan negara dari serangan musuh; dan (4) *to sulesana*, yakni orang yang mempunyai keahlian khusus seperti teknokrat yang mempunyai ide dan karya guna kepentingan bangsa. Keempat golongan tersebut dapat

menempati struktur sosial yang elite, meskipun berasal dari kalangan rakyat biasa. Sementara itu, menurut H.J Fredericy (1963), pada dasarnya terdapat tiga kelompok yaitu; bangsawan (*ana' karaeng*); orang merdeka (*tu'maradeka*); dan kelompok hamba (*ata*) (Hamid Abdullah, 1985). Kelompok bangsawan merupakan lapisan teratas yang dapat menduduki kepemimpinan dalam masyarakat. Kelompok orang merdeka adalah mereka yang memiliki keahlian tertentu. Sementara kelompok hamba bukan berarti budak, namun karena perjalanan hidupnya mengalami nasib yang kurang baik. Kelompok tersebut tetap diperlakukan sebagai manusia yang wajar, dan seorang *ata* tidaklah tertutup kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya menjadi manusia yang termasuk kelompok merdeka.

Pelapisan sosial tersebut, saat ini tidak seketat dulu lagi, masyarakat bangsawan dan non-bangsawan sudah lebih berbaur. Namun sebagai komunitas, tetap saja ada kelas sosial yang membedakannya. Sebagai contoh, di kantor-kantor pemerintahan, sapaan yang digunakan bukan sapaan Bapak atau Ibu, tetapi sapaan gelar kebangsawanan, seperti *puang* (Bugis) atau *karaeng* (Makassar) kepada pejabat atau pimpinan, yang memegang jabatan dari kalangan bangsawan karena dulunya lebih mudah mengakses untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kecenderungan untuk menggunakan sapaan *puang* atau *karaeng*, juga berlaku kepada pejabat yang non-bangsawan, karena pejabat tersebut memiliki pendidikan tinggi. Fenomena tersebut menandakan masyarakat Bugis-Makassar memberi apresiasi yang tinggi terhadap orang yang berpendidikan (Asmunandar, 2008: 35-36).

Pengelompokan penduduk yang membentuk kehidupan sosial Kota Makassar mulai tampak pada akhir abad-17 yaitu sejak keberhasilan Belanda (VOC) menguasai daerah ini. Pengelompokan penduduk menurut kategori sosial-ekonomi dan sosio-kultural diantaranya; elemen pertama yaitu Fort Rotterdam menjadi permukiman Belanda, elemen kedua tumbuh dan berkembang di sebelah timur Fort Rotterdam yang disebut sebagai “perkampungan pedagang” atau “*negory Vlaardingen*”, yang merupakan permukiman bagi orang-orang asing termasuk etnis Tionghoa. Elemen ketiga adalah Kampong Melayu yang dihuni oleh orang-orang Melayu, permukiman lain bagi orang-orang pribumi adalah

Kampung Baru yang bersebelahan di bagian selatan Fort Rotterdam. Pertimbangan keamanan menjadi faktor utama pengelompokan tersebut, dimana Fort Rotterdam dikelilingi oleh permukiman-permukiman bagi etnis lain (Yulianto Sumalyo, 1999: 303 dan 306). Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan situasi keamanan yang semakin kondusif, pengelompokan ini mengalami perubahan. Saat ini, identifikasi terhadap elemen-elemen tersebut masih dapat ditemui pada peninggalan bangunan berupa sarana ibadah, yaitu Kampung Melayu dengan adanya Mesjid, Fort Rotterdam dengan adanya Gereja, serta adanya klenteng di kawasan *Vlaardingen*.



Foto 4.6 Mesjid yang ada di Kampung Melayu (Jalan Lombok)  
Sumber: Dokumentasi Asmunandar, 2005



Foto 4.7 Klenteng di Jalan Lombok  
(*Vlaardingen*)  
Sumber: Pecinan Makassar, 2010



Foto 4.8 Gereja di Kompleks  
Fort Rotterdam  
Sumber: Dokumentasi Asmunandar, 2005.

Seiring dengan pertumbuhan kota, kehidupan sosial semakin kompleks dengan banyaknya jenis pekerjaan sehingga menarik para pendatang dari daerah

lain. Penduduk kota yang merupakan etnis Makassar bekerja sebagai buruh tetap maupun buruh musiman yang bermukim di kota atau daerah pinggiran kota (Mudiyono, 1978: 72-73). Bidang pekerjaan lain adalah *pa gandeng* atau penjual sayuran, buah-buahan dan bahan pangan berkeliling kota dengan menggunakan sepeda (Tachya, 1983: 1-4). Fenomena tersebut masih berlangsung hingga kini khususnya yang berasal dari beberapa daerah di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng, khususnya daerah Loka, yang terkenal sebagai daerah penghasil sayur-sayuran (Asmunandar, 2008: 29-30).

Pendatang yang berasal dari daerah lain di Sulawesi bagian selatan seperti orang Mandar mendiami daerah pesisir pantai Kecamatan Mariso. Menurut sensus tahun 1930, jumlah orang Mandar yang merantau ke luar daerah, termasuk mereka yang berdiam di Kota Makassar mencapai 13.195 orang (Volkstelling 1930, IV : 190-279). Selain sebagai nelayan kecil, orang Mandar juga menjadi pedagang perantara terutama sebagai pedagang hasil bumi yang diambil dari kampung mereka sendiri seperti komoditas kelapa, minyak kelapa, kopra, pisang, ikan asin dan industri rumah tangga terutama sarung sutra. Sedangkan orang Toraja lebih banyak bekerja sebagai agen polisi, pelayan toko, tukang kayu, pesuruh kantor dan tukang sepatu (Suratha, 1977, 22).

Etnis lain yang merupakan bagian terbesar penduduk kota adalah pendatang dari wilayah yang masuk dalam kelompok geo-etnik Bugis. Pada tahun 1930, seperempat bagian penduduk kota terdiri dari orang Bugis, baik sebagai pendatang maupun yang telah menetap lebih dulu di Kota Makassar (Paeni, 1984: 90). Kehadiran orang-orang Bugis di Kota Makassar dimulai sejak keberhasilan Belanda (VOC) dan Arung Palakka (Raja Bone) menguasai daerah ini, Arung Palakka sebagai penguasa lokal menempatkan kediamannya di Bontoala yang saat itu merupakan daerah pinggiran di sebelah timur Fort Rotterdam. Kampung Bontoala sekaligus menjadi titik pemberangkatan utama para perantau Bugis, tidak hanya dari Bone tetapi juga orang-orang Wajo (Pelras, 2006: 166). Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang Wajo membentuk permukiman yang terpisah dari Kampung Bontoala yaitu Kampung Wajo, sebagian besar dari mereka bergerak di bidang usaha atau perdagangan (Abu Hamid, 1979: 61). Pada

umumnya pekerjaan yang mereka tekuni berlanjut hingga sekarang, yang mencitrakan asal usul mereka. Orang Bugis Wajo bekerja sebagai pedagang yang sering disebut “Cina Bugis”, orang Toraja tukang sepatu atau pun orang Banjar sebagai tukang jahit.



Foto 4.9 Penduduk Kota abad ke-19 dengan mata pencaharian pedagang  
Sumber: KITLV, 2010



Foto 4.10 Penduduk Kota abad ke-19 dengan mata pencaharian kain tenun  
Sumber: KITLV, 2010



Foto 4.11 Tambak Garam yang berada di Pinggiran Kota, tahun 1935  
Sumber: KITLV, 2010

Etnis lain yang membentuk kehidupan sosial di Kota Makassar yang merupakan etnis pendatang di Kota Makassar hidup dengan berbagai jenis pekerjaan. Pendatang yang berasal dari etnis Banjar umumnya sebagai pedagang perhiasan, tukang jahit, tukang emas, pedagang batu permata dan pembuat kopiah.



Demikian pula orang Minahasa bekerja sebagai aparat pemerintah (pegawai militer), orang-orang Sangir sebagai buruh dan pegawai kecil, orang Ambon sebagai aparat pemerintah dan juga sebagai misionaris, orang Timor sebagai buruh, orang Madura sebagai tukang pangkas rambut dan buruh, orang Tanimbar sebagai pegawai dan buruh kecil, orang Buton sebagai buruh kasar pada berbagai lapangan pekerjaan seperti pembuatan jalan, dermaga dan bangunan-bangunan (Paeni, 1984: 87-88). Pendetang dari pulau Jawa yang merantau ke Sulawesi dan umumnya bermukim di Kota Makassar membuka rumah makan khas Jawa.

Etnis lain yang termasuk pendatang dari wilayah luar nusantara yang membentuk kehidupan sosial di Kota Makassar, diantaranya: etnis Arab kebanyakan sebagai pedagang dan imam di mesjid-mesjid, etnis Melayu kebanyakan sebagai pegawai *sara'* (agama), etnis Tionghoa kebanyakan sebagai pedagang, sebagian kecil tukang kayu, tukang sepatu dan pandai emas, dan etnis India bergerak di bidang perdagangan kain, rempah-rempah dan obat-obatan (Paeni, 1984: 87-88). Sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Makassar berlangsung sejak awal pertumbuhan kota oleh Pemerintah Belanda, mereka ditempatkan di kawasan *Vlaardingen* berdampingan dengan bangsa Eropa. Kawasan tersebut menjadi kawasan Pecinan dengan adanya Klenteng sebagai bangunan keagamaan, dan hingga saat ini, etnis Tionghoa merayakan tahun baru imlek dan perayaan *Cap Go Meh*.



Foto 4.12 Perayaan *Cap Go Meh*,  
Pada tahun 1880  
Sumber: KITLV, 2010



Foto 4.13 Perayaan *Cap Go Meh*,  
Pada Tahun 2010  
Sumber: Pecinan Makassar, 2010

Peran Makassar dalam bidang perdagangan dan pelayaran niaga memiliki pelabuhan laut sehingga mencirikan masyarakat maritim, dan kehidupan masyarakatnya bergerak pada bidang perdagangan, pelayaran niaga, nelayan dan sebagian di bidang agraris. Kehidupan masyarakat ini berlangsung hingga abad 19, namun di awal abad ke-20 kehidupan agraris khususnya persawahan dan perkebunan mulai berkurang, karena menyempitnya lahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang membutuhkan sarana permukiman dan bangunan-bangunan baru (Paeni dkk, 1984: 64-65). Saat ini, Kota Makassar sebagai pusat pelayanan di Indonesia bagian timur tetap bertahan dan masih berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Data tahun 2000 tentang kontribusi perekonomian Kota Makassar menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang penerimaan terbesar yaitu 27,96%, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan 26,1%, sektor pengangkutan dan komunikasi 12,36%, sektor jasa-jasa 13,56%, dan sektor lainnya (pertambangan, pertanian, dll) sebesar 20,02%. Sektor perdagangan Kota Makassar terdiri atas perniagaan berupa pasar-pasar tradisional, pasar grosir sampai mal-mal modern (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2004). Data ini menunjukkan bahwa saat ini, peran Kota Makassar khususnya di Indonesia bagian timur menarik para pendatang dengan tersedianya berbagai jenis pekerjaan, serta peran Kota Makassar sebagai pusat pendidikan turut berperan signifikan terhadap meningkatnya jumlah penduduk.

Sementara itu, migrasi yang masuk ke Kota Makassar terdiri atas dua gelombang dari tahun 1945 hingga tahun 1970. Gelombang pertama terjadi tahun 1945 hingga 1950 yang datang dari berbagai daerah di Indonesia Timur, dan gelombang kedua dari tahun 1950 hingga akhir 1960-an yang umumnya berasal dari daerah di Sulawesi bagian selatan (Pradadimara, 2004: 8). Disebutkan pula bahwa gelombang pertama merupakan refleksi pentingnya posisi sosial politik Kota Makassar di Indonesia bagian timur, dan arus gelombang kedua karena kondisi keamanan bersamaan dengan meluasnya operasi militer baik oleh TNI maupun oleh “gerombolan” (Pemberontakan Kahar Muzakkar). Migran gelombang kedua ini berjumlah lebih banyak dibanding gelombang pertama

(Pradadimara, 2004: 8). Gelombang awal proses migrasi yang masuk ke Kota Makassar terjadi pada awal penguasaan Belanda (VOC) atas daerah ini, disebutkan bahwa pada masa tersebut orang-orang Arab, Cina, Melayu dan orang-orang Bugis (Bone dan Wajo) diberikan lahan oleh Pemerintah Belanda baik dalam maupun di daerah pinggiran kota (Mattulada, 1991: 97).

Pengaruh terhadap kondisi sosial perkotaan dari proses urbanisasi yang terjadi pada tahun 1960-an, dijelaskan oleh Dias Pradadimara (2004), berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (1973), bahwa daerah permukiman yang bangunannya “bermutu baik” hanya berada di tengah kota, sedang kondisi sebaliknya ditemui di pinggiran kota seperti di sekitar Pannampu, Baraya, Kalukubodoa, Maccini, dan Barabaraya. Daerah pinggiran inilah para imigran “membangun daerah-daerah permukiman miskin dan perumahan setengah liar yang luas di sekeliling bagian pinggiran kota yang ada, mengambil alih tanah apa saja yang mereka anggap tak berpenghuni” (Pradadimara, 2004: 10). Hingga saat ini, “wajah kota” sebagaimana yang digambarkan tersebut masih menjadi bagian dari “peta kota”. Pusat kota yang berada di sekitar Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi hingga Jalan Veteran menjadi daerah dengan kondisi yang baik, sementara pada bagian lain terutama sepanjang kanal adalah permukiman dengan kondisi yang kurang baik terutama tampak pada bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Daerah selanjutnya di sekitar Jalan A.P. Pettarani kembali dijumpai daerah dengan kondisi yang lebih baik.

Catatan tentang jumlah penduduk di kota Makassar pada akhir abad ke-19 menyebutkan bahwa jumlah penduduk kota berada pada kisaran 20 ribu-an saja. Jumlah ini semakin berkembang pada tahun 1905, diperkirakan sekitar 65 ribu orang, jumlah ini berkembang setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1930, jumlah tersebut meningkat lebih dari 3 kali dan mencapai lebih dari 84 ribu orang. Catatan tahun yang sama menyebutkan bahwa terdapat hampir 3500 penduduk “Eropa”, lebih dari 15.000 “Cina”, dan lebih dari 65.000 “Bumiputera” dari berbagai daerah di Hindia (Pradadimara, 2004: 3-5). Setelah masa kemerdekaan, jumlah tersebut meningkat 384 ribu berdasarkan sensus tahun 1961. Angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan

jumlah penduduk hampir 5% per tahun. Pada masa orde baru laju pertumbuhan meningkat sebesar 5,52% dari tahun 1971 ke tahun 1980 (Pradadimara, 2004: 11). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk tahun 2000 mencapai 1.130.384 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65% pertahun (Makassar Dalam Angka, 2004). Data tahun 2006 menunjukkan jumlah penduduk meningkat menjadi 1.223.540 jiwa (Makassar Dalam Angka, 2007).

### **4.3 Perkembangan Struktur Tata Ruang Kota**

Pertumbuhan Makassar sebagai kota, dilihat dari perkembangan tata ruang kotanya, berlangsung mulai dari akhir abad ke-17 hingga saat sekarang ini. Pada bagian ini pembahasan tentang pertumbuhan tata ruang kota dibagi atas beberapa fase yaitu; fase pertama, akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-19, fase kedua, awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dan fase ketiga, awal abad ke-20 hingga saat ini (masa kemerdekaan). Penting dikemukakan sebelumnya bahwa dasar pembagian fase ini didasarkan pada berbagai peristiwa dan kebijakan yang menjadi faktor utama mendasari pembentukan struktur tata ruang kota, yaitu : fase pertama ditandai dengan keberhasilan Belanda (VOC) menguasai daerah ini, fase kedua ditandai dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian pada bulan Juni 1824 yang merupakan pembaruan Perjanjian Bungaya, dan fase terakhir ditandai dengan ditetapkannya Kota Makassar sebagai daerah otonom dengan nama *Gemeente van Makassar* pada tanggal 12 Maret 1906. Pertumbuhan tata ruang kota pada fase ketiga tidak lagi didominasi oleh kebijakan Pemerintah Belanda, karena adanya peralihan kekuasaan baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada masa kemerdekaan.

#### **4.3.1 Struktur Tata Ruang Kota Akhir Abad Ke-17 hingga Awal Abad ke-19**

Fase ini ditandai dengan kehidupan *intra muros* yaitu kehidupan dalam benteng. Sejarah Kota Makassar termasuk sejarah pertumbuhan kota dan arsitekturnya, dimulai dari *Fort Rotterdam* yang dipilih Belanda sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan militer. *Fort Rotterdam* mengalami perombakan besar-besaran di tahun 1673, bahkan mungkin secara total. *Fort Rotterdam*

dikelilingi oleh parit sebagai upaya untuk menghambat serangan musuh. Benteng ini dilengkapi dengan beberapa unit bangunan antara lain gereja, gudang mesiu, kediaman gubernur, kantor gubernur, balai kota, kediaman pendeta, kantor kepala bagian perdagangan, kantor pusat perdagangan, barak militer, dan gudang-gudang (gudang kapal, gudang batubara dan gudang untuk barang dagangan) (Yulianto Sumalyo, 1999: 302).

Sekitar abad ke-17, di Kota Makassar telah terbentuk struktur tata ruang kota dengan adanya permukiman yang di sekitar benteng, yaitu: *Negory Vlaardingen* dan Kampong Melayu di sebelah utara benteng, kampong baru di sebelah selatan benteng. Elemen lain adalah dengan adanya benteng kecil yaitu Vredenburg di sebelah timur tidak jauh dari Fort Rotterdam. Pola yang terbentuk dengan adanya permukiman tersebut menunjukkan bahwa permukiman-permukiman tersebut mengelilingi Fort Rotterdam yang direncanakan untuk melindungi Fort Rotterdam. Dengan demikian, dalam perencanaan kota terdapat dua jenis permukiman yaitu permukiman yang dilindungi yang tampak pada Fort Rotterdam dan permukiman terbuka yang tampak di sekitar benteng yaitu *Vlaardingen*, *Kampong Melayu*, dan *Kampong Baru*. Ditambahkan oleh Mattulada (1991), Benteng Ujung Pandang atau *Fort Rotterdam* dan sekitarnya kemudian menggantikan peran Somba Opu sebagai pusat kekuasaan dan (*Staad Vlaardingen* berfungsi sebagai pusat niaga, adapun daerah sekitarnya menjadi permukiman bagi orang-orang Melayu dan Bugis yang dipanggil oleh Belanda. Orang-orang Melayu diberikan lokasi yang saat itu disebut hutan *Bulakeng*, dan dijadikan sebagai permukiman disebut *Kampong Melayu* yang dikelilingi pagar dengan tanggul yang ditinggikan, permukiman ini dilengkapi pula dengan meriam pada gerbangnya. Permukiman-permukiman lain yang berada di bagian utara dan timur kota, yaitu: *Kampong Mallimongang*, *Kampong Rompegading*, *Kampung Mampu* dan *Kampung Bontoala* yang sekaligus terdapat istana bagi Arung Palakka. Istana yang disebut “*Koning der Buginezen*”, menghadap Fort Rotterdam dan dikelilingi oleh tembok dengan halaman yang luas (Mattulada, 1991: 97-98).



Foto 4.14 “*Koning der Buginezen*” Istana Arung Palakka yang ada di Kota Makassar (*Kampong Bontoala*)  
Sumber: KITLV, 2010

Tentang asal muasal penamaan kampung yang ada di Kota Makassar saat ini, disebutkan oleh Mattulada (1991), diantaranya: *Kampong Maradekaya* adalah permukiman bagi orang-orang Makassar yang ditahan dan telah bebas sebagai tahanan orang bugis; *Kampong Lariang Bangi* berarti membawa lari pada malam hari, penamaan ini dikarenakan banyaknya peristiwa penculikan terhadap anak gadis; *Kampong Gaddong* berada di sebelah barat istana Arung Palakka, di lokasi ini terdapat sebuah gedung yang difungsikan sebagai gedung perbendaharaan dan tempat penyimpanan harta benda; *Kampong Bara-ya* berarti kandang ternak; *Kampong Pattunuang* merupakan tempat penyembelihan hewan-hewan ternak (Mattulada, 1991: 100). Kampung-kampung tersebut merupakan daerah pinggiran kota dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu sehingga menjadi lingkungan permukiman dengan keadaan yang kurang baik (Yulianto Sumalyo, Hingga saat ini, toponim-toponim tersebut masih dikenal dan menjadi penamaan wilayah administratif setingkat kelurahan.



Foto 4.15 Rumah Tinggal Penduduk Pribumi, tahun 1890  
Sumber: KITLV, 2010



Foto 4.16 Bentuk lain Rumah Tinggal Penduduk Pribumi, tahun 1890  
Sumber: KITLV, 2010

Struktur tata ruang kota juga tampak pada jaringan jalan yang ada di permukiman *Vlaardingen* berupa jalan-jalan lurus sejajar dengan garis bibir pantai, yaitu membujur arah utara-selatan. Jalan-jalan tersebut dipotong melintang oleh jalan lainnya hampir tegak lurus. Sejajar dengan kanal menuju Vredenburg, membentuk poros terpenting saat itu (Yulianto Sumalyo, 1999: 308). Empat jalan utama yang membujur, paling barat adalah *Cinastraat* (*Passerstraat*) dan sekarang menjadi Jalan Nusantara, *Templestraat* (sekarang Jalan Sulawesi), *Middlestraat* (sekarang Jalan Bonerate) dan *Burgherstraat* (sekarang Jalan Jampea). Pemukiman warga Tionghoa juga telah terbentuk pada fase ini dengan adanya Vihara Ibu Agung Bahari/Thian Ho Kong (1738) yang terletak di Jalan Sulawesi (Asmunandar, 2008: 38).

Permukiman *Vlaardingen* pada awal abad ke-19 mempunyai pola *Medieval*, yaitu dengan bentuk rumah-rumah yang berpagar tinggi dan tanpa halaman depan. Jaringan jalan yang terbentuk di permukiman ini, terdapat jalan utama yang melintang timur-barat yang disebut dengan *Hoogepad* dan sekarang bernama Jalan Jendral Ahmad Yani. Pada ujung timur jalan ini, dibangun benteng kecil yang disebut dengan *Vredenburg*, untuk mengawasi gangguan dari arah timur. Keberadaan benteng Vredenburg membuktikan bahwa keadaan Kota Makassar belum aman sepenuhnya. Terkadang masih ada perlawanan dan serangan dari Gowa atau penduduk yang anti Belanda. Benteng Vredenburg dikelilingi parit yang terhubung dengan kanal yang mengarah ke laut. Perkembangan penting yang terjadi pada masa ini adalah terbentuknya poros jalan dari *Fort Vredenburg* ke arah selatan yang menghubungkan dengan wilayah Gowa (Yulianto Sumalyo, 1999: 310-311). Elemen penting yang tampak pada peta Kota Makassar akhir abad ke-17 adalah adanya pasar yang berada di sebelah utara benteng, rumah sakit di sebelah timur benteng dan perkebunan yang berada agak jauh di sebelah timur benteng.

#### **4.3.2 Struktur Tata Ruang Kota Awal Abad Ke-19 hingga Awal Abad ke-20**

Fase ini ditandai dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian pada bulan Juni 1824 yang merupakan pembaruan *Perjanjian Bungaya* (Mattulada, 1982). Pada fase ini, Pemerintah Belanda telah membangun sarana berupa Lapangan

*Koningsplein* yang sekarang bernama Lapangan Karebosi (Yulianto Sumalyo, 1999: 308). Secara geografis *Koningsplein* terletak di tengah-tengah kota menjadi lapangan luas hingga depan Rumah Sakit Pelamonia sekarang. Bagian selatan *Koningsplein* yang dipotong oleh Jalan Ince Nurdin, digunakan untuk *Schietterrein Voor Infanterie* atau lapangan tembak infantri. Daerah sebelah timurnya atau sekarang di sekitar rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, digunakan untuk lapangan tembak artileri (Asmunandar, 2008: 40).

Awal Abad ke-19, keadaan politik di Kota Makassar mulai aman. Perlahan, kehidupan dalam benteng ditinggalkan dan beralih ke luar benteng (*extra muros*), dengan memindahkan beberapa unit bangunan ke luar benteng. Diantaranya membangun kediaman gubernur Belanda pada tahun 1885 dan Gereja Protestan Immanuel tahun 1885 di bagian timur Fort Rotterdam (Yulianto Sumalyo, 1999: 314). Gereja masih berfungsi awal sedangkan kediaman Gubernur Belanda menjadi kantor Polisi Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Makassar yang sebagian besar bangunannya telah mengalami perubahan fisik.

Bagian utara *Koningsplein*, terdapat tiga bangunan yang dapat mengungkapkan ciri sistem pemerintahan Belanda yaitu unsur eksekutif dan yudikatif, yaitu gedung *Stadhuis* (Balai Kota), *Gevangnis* (penjara) dan *Gerechtsplaats* (pengadilan) (BAPPEDA, 1992: 26). Sebuah sekolah bernama *Schoolgebouw*, di jalan yang sekarang bernama Jalan Balai Kota dan gedung pertemuan milik *Club Soranus* di sisi selatan *Koningsplein*, tepatnya di jalan yang sekarang bernama Jalan Kajaolalido. *Schoolgebouw*, diganti dengan bangunan baru yang bernama Sekolah Frater, dibangun pada tahun 1934 sedangkan lahan bekas gedung *Club Soranus*, kini berdiri gedung perkantoran.

Hingga awal abad ke-19, struktur Kota Makassar tidak banyak berubah. Sekitar Fort Rotterdam menjadi lingkungan Belanda yang eksklusif. *Vlaardingen* keadaannya semakin baik dengan bangunan yang sebagian besar dari batu. Sementara *Kampung Baru*, *Kampung Melayu* dan daerah pinggiran kota kebanyakan terdiri dari bangunan yang terbuat dari bambu sehingga menjadi lingkungan permukiman dengan keadaan yang kurang baik (Sumalyo, 1999: 308). Berdasarkan pengamatan peta, pada akhir abad ke-19, Pemerintah Belanda juga



mendirikan beberapa bangunan penting di antaranya rumah sakit (sekarang bernama Rumah Sakit Pelamonia) di bagian tenggara *Koningsplein*, *Oliefabriek* atau pabrik minyak di Matjiniajo bagian utara *Koningsplein*, *Yafabriek* atau pabrik es bernama Aurora dan *Gasfabriek* (pabrik gas) di sebelah timur *Koningsplein*. Pada tahun 1896 dibangun gedung *Societeit de Harmonie*, yang terletak di utara Fort Rotterdam.

Pada perkembangan selanjutnya, *Vlaardingen* berkembang menjadi Kampung Cina (Pecinan), bangunannya berpola campuran *Medieval* dan Tionghoa dengan rumah-rumah berpagar tinggi, tanpa halaman depan. Bangunan lain yang masih bertahan adalah Rumah Abu Famili Nio (pertengahan abad ke-18), Klenteng Kwan Kong (1810-an), Klenteng Siang Ma Kiang (1860), rumah leluhur Marga Thoeng dan rumah abu Thoeng Abadi (1898). Sarana penting juga dibangun bagi penduduk lokal, diantaranya pelabuhan rakyat di utara kota yang disebut dengan *Paotere*. Bangunan penting yang ada di sekitar *paotere* adalah tempat tinggal yang disebut dengan *Landhuis Patingaloang* yang tidak ditemukan lagi bekasnya. Hingga kini *Paotere* menjadi pelabuhan rakyat dan tempat pelelangan ikan bagi nelayan dari berbagai daerah di sekitar Kota Makassar (Asmunandar, 2008: 45).

Peta yang ada juga menunjukkan pemukiman bagi orang-orang pribumi yang berkembang mengelilingi pusat kota diantaranya Oedjoeng Tanah (baca; ujung tanah), Wajo, Bandang dan Matjiniajo (baca; macciniajo) yang terletak di bagian utara dan timur kota. Daerah Bontoala, Pattoenoewang (baca; pattunuang) dan Matjini berada di bagian timur kota, sedangkan Losari, Bassi dan Baroe (baca; baru) di bagian selatan kota. Kampong-kampong tersebut merupakan wilayah penyangga bagi Kota Makassar karena merupakan lahan pertanian penduduk pribumi (Asmunandar, 2008: 46).

Pemerintah Belanda dalam membangun kota tidak hanya dari fisik saja namun juga memperhatikan penghijauan kota, ditandai dengan pembangunan taman agar warga kota khususnya bangsa Eropa merasa berada di negeri sendiri. Taman-taman yang didirikan pada masa ini diantaranya *Prins Hendrik Plein* di utara Fort Rotterdam dan *Kerkplein* di timur Fort Rotterdam. Di sisi timur *Prins Hendrik Plein* terdapat *Juliana Park* dilengkapi dengan *muziekkoppel* (gardu

musik) dan sebuah tugu peringatan. Bekas lahan *Prins Hendrik Plein* sekarang berdiri Kantor Radio Republik Indonesia (BAPPEDA, 1992: 30, Yulianto Sumalyo, 1999: 311-312).

#### 4.3.3 Struktur Tata Ruang Kota Awal Abad Ke-20 Hingga Sekarang

Pada fase ini Kota Makassar menjadi daerah otonom dengan nama *Gemeente van Makassar* pada tanggal 12 Maret 1906 berdasarkan *Stadblad* No. 17 yang secara resmi digunakan pada tanggal 1 April 1906. Guna mengukuhkan status kota tersebut, diantaranya dibangun gedung Balai Kota atau *Gemeentehuis* pada tahun 1918, di Jalan Balaikota (sekarang berfungsi sebagai Museum Kota Makassar), dan di sebelah utara Fort Rotterdam, dibangun gedung CKC (didirikan tahun 1910) yang berfungsi sebagai kantor gubernur.



Foto 4.17 Kantor Walikota  
(*Gemeentehuis*), pada tahun 1905  
Sumber: KITLV, 2010



Foto 4.18 Museum Kota Makassar  
Sebelumnya berfungsi Kantor Walikota  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2010

Pada fase ini struktur tata ruang kota tidak banyak berubah, perubahan yang terjadi adalah didirikannya beberapa bangunan dengan fungsinya masing-masing. Berdasarkan Laporan Inventarisasi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala tahun 2000, memberi petunjuk tentang bangunan yang ada pada saat itu, diantaranya: apotik yang bernama Rathkamp (1920) (sekarang Apotik Kimia Farma) dan percetakan NV. OGEM (1920-an) (sekarang Kantor Kia Motors) yang kondisinya masih terawat. Di jalan ini pernah pula berdiri Grand Hotel, salah satu hotel terbesar waktu itu. Beberapa gedung sekolah yang tersebar di Kota Makassar juga berdiri, di antaranya: sekolah bagi orang-orang Eropa; *Eerste*

*Europeesche Loger School* (1910), *Frobel School 1* (1920), *Arens School* (1928), dan *MENALIA* (1934). Selain itu, sekolah bagi orang-orang pribumi serta etnik lain juga telah dibangun diantaranya *OSVIA* (1910), *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen te Makassar* (1915), *Hollandsche Inlandsche School* (1920), *MULO* (1927) bagi pribumi dan *Holland Chinese School* (1907), sekolah *Kwan Bun* (1920), Sekolah *Loen Djie Tong* (1930-an) bagi orang-orang Cina serta *Eerste Ambonsche School* dan *Tweede Ambonsche School* (1906) bagi etnik Ambon. Terdapat pula sekolah untuk anak laki-laki yang akan dididik menjadi pastor (*Katholike Sociale Bond*) tahun 1940.

Pada akhir abad ke-19, sebagian *Koningsplein* yang dahulu untuk latihan infantri, mulai dijadikan pemukiman. Jaringan jalan yang melintang timur-barat dibuat untuk menghubungkan *Hospitalweg* (sekarang Jalan Jenderal Sudirman) dengan *Komedilaan* (sekarang Jalan Kajaolalido) dan *Prinsenlaan* (sekarang Jalan Bontolempangan). Jaringan jalan tersebut dari arah utara ke selatan adalah; *Julianaweg* (sekarang Jalan Kartini), *Justitelaan* (sekarang Jalan Amanagappa), *Bensbachtlaan* (sekarang Jalan Ince Nurdin), *Tromplaan* (sekarang Jalan Chairil Anwar), *Koningslaan* (sekarang Jalan Sawerigading) dan *Princessenlaan* (sekarang Jalan Emmy Saelan) (BAPPEDA, 1992: 27-28).

Fasilitas lain yang dibangun oleh Pemerintah Belanda di Kota Makassar pada saat itu adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengadilan. Bngunan ini berada di ujung tenggara *Koningsplein* yang disebut *Raad van Justitie* (1915) yang letaknya bertolak belakang dengan *Landraad*. Kedua bangunan tersebut kini berfungsi sebagai Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar. Fasilitas penting lainnya yang dibangun pada fase ini diantaranya adalah *Hamente Waterleiding* (1920) yang sekarang ada di Jalan Ratulangi. Bangunan ini merupakan instalasi penyedia air minum untuk Kota Makassar, *Post Cantoor* (1925), Kantor Polisi Militer (1935), *Landrente* (1940), *Post en Telegraf Cantoor* (1940), *Politie Cantoor* dan Kantor BOW (sejenis Kantor Pekerjaan Umum) (BAPPEDA, 1992: 31) di bagian timur Rotterdam. *Hamente Waterleiding*, *Post Cantoor* dan *Post en Telegraf Cantoor* masih berfungsi awal, sedangkan *Landrente* menjadi kantor Departemen Keuangan dan BOW berubah status kepemilikan menjadi milik PT. Timurama (Asmunandar, 2008: 49-50).

Kawasan pelabuhan bagian utara Rotterdam dijadikan sebagai pusat perdagangan dengan berbagai kantor, gudang dan toko yang menyatu dengan hunian. Bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini diantaranya KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschaapij*; Perusahaan Pelayaran Belanda) dan gedung *Javasche Bank* (1915), sebuah bank terbesar pada zaman Belanda. Saat ini, kedua bangunan tersebut telah hilang akibat perluasan pelabuhan di kawasan Jalan Nusantara. Kawasan pelabuhan dilengkapi dengan gudang diantaranya yang dikenal dengan Gudang Mascapai (1920), gudang beras (1920), dan Tjian Rijn & Co. (1920) (Asmunandar, 2008: 50). Bangunan lain adalah kantor dan gedung lainnya yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan, seperti kantor BPM (*Bataafsche Petroleum Maatshchappij*; perusahaan minyak Belanda), *Standard Oil*, *SM Ocean* (perusahaan pelayaran) dan SMN (*Stoomvaart Maatshchappij Nederland*) yang terletak di kawasan pelabuhan Soekarno-Hatta (BAPPEDA, 1992: 34).

Pada awal abad ke-20, di Kota Makassar dibangun pula fasilitas kesehatan yaitu berupa Rumah Sakit Jiwa (*Krankzinning Gestricht*) tahun 1920-an dan Rumah Sakit Bersalin Tionghoa (1938). Rumah Sakit Jiwa sekarang berada di Jalan Lanto Dg Pasewang dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Dadi. Sementara Rumah Sakit Bersalin Tionghoa terletak di wilayah selatan *Koningsplein* dan sekarang berubah menjadi Rumah Sakit Bersalin Sentosa (Asmunandar, 2008: 51).

Pada tahun 1939 di ujung barat *Hoogepad*, dibangun kantor gubernur, menggantikan kantor gubernur sebelumnya. Kawasan ini berkembang sebagai daerah eksklusif dengan berbagai fasilitas diantaranya *Grand Hotel* (sekarang menjadi kantor BRI) dan *Empress Hotel* (sekarang menjadi Sekolah Islam Athirah) di sisi barat *Koningsplein*. Sementara itu, kawasan perumahan penduduk lokal, yang terdiri dari kampung-kampung, masih terbuat dari bambu dan papan. Kondisi bangunan rumah ini berlangsung hingga awal abad ke-20, dan setelah pertengahan abad ke-20 terdapat sebuah rumah yang terbuat dari bata. Rumah warga keturunan Bugis ini bernama H. Patiwiri yang dibangun pada tahun 1954, dengan konsep *Garden City*. Rumah tersebut sekarang ini berada di Jalan Arif Rate atau yang dulu dikenal dengan *Heerenweg* (Asmunandar, 2008: 52).

Sarana hiburan juga dibangun seperti Bioskop Luxor, yang letaknya berdampingan dengan Empress Hotel (Jalan Ahmad Yani), Bioskop Sirene di sudut Jalan Jendral M. Yusuf dan Jalan Lompobattang serta Bioskop Capitol (1950) di sebelah selatan Fort Rotterdam yang berganti nama menjadi Bioskop Benteng. Pada tahun 2003 Bioskop Benteng dialihfungsikan menjadi Colors Pub. Sarana hiburan lain adalah *Zwembad Harmonie* (kolam renang “Harmonie”), berada di sebelah selatan Fort Rotterdam (Asmunandar, 2008: 52).

Fasilitas lain adalah bangunan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, sebuah organisasi sosial katolik, kongregasi suster JMJ mendirikan sebuah rumah sakit di tahun 1938 bernama Stella Maris. Lokasi Rumah Sakit Stella Maris berada di pinggir Pantai Losari bagian selatan Fort Rotterdam (BAPPEDA, 1992: 35). Fasilitas lain yang dibangun di lokasi ini adalah fasilitas hiburan dengan adanya kantin militer di ujung selatan pantai losari. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1930-an dilaksanakan pembangunan pondasi sepanjang 910 meter untuk tanggul di pantai tersebut, dan penambahan trotoar pada tahun 1965. Lokasi ini kemudian dijadikan sebagai pusat jajanan kaki lima, hingga tahun 1988 sekitar 254 penjual menawarkan berbagai jenis makanan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Pantai Losari sebagai “Restoran Terpanjang Dunia” (Ahmadin, 2008: 34-35). Tahun 2004, Pemerintah Kota merencanakan revitalisasi terhadap ruang publik tersebut, namun menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga kota. Tahun 2005-2006, Pemerintah Kota tetap melaksanakan proyek tersebut, dan hingga tahun 2010 proyek tersebut masih berjalan dengan pengerjaan tahap akhir.



Foto 4.19 Pantai Losari, pada tahun 1953  
Sumber:  
Benteng Kehidupan, 2010



Foto 4.20 Pantai Losari pada tahun 2006  
Sumber:  
Photo Bucket.com, 2010

Perkembangan kota ke arah pinggiran kota menyebabkan fasilitas militer juga mengalami pergeseran yang pada awalnya dipusatkan di Fort Rotterdam beralih ke selatan kota. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kompleks militer di Jalan Rajawali sekitar tahun 1915. Dalam kurun waktu 1930-an dibangun kompleks perwira militer Belanda di selatan *Koningsplein* (Jalan Sungai Tangka, Jalan Sungai Lariang dan Jalan Gunung Klabat). Hingga kini kompleks tersebut masih digunakan untuk kompleks perumahan perwira Militer Kodam VII Wirabuana. Pada tahun 1937 dibangun *gouverneur woning* yang sekarang berfungsi sebagai rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Kompleks perwira militer Belanda maupun *gouverneur woning* merupakan bekas lahan lapangan tembak artileri. Perumahan menampakkan ciri *garden city* atau kota taman, dimana bangunan tidak berdempetan tetapi dikelilingi oleh halaman dan taman yang luas.

Perkembangan lain adalah permukiman-permukiman yang secara administratif disebut dengan distrik. Sebelum tahun 1921, Kota Makassar terbagi dalam enam distrik yaitu; Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan Mariso. Distrik Makassar, Wajo, Melayu dan Ende masing-masing diperintah oleh *Kapitein*. Sedangkan Ujung Tanah dan Mariso masing-masing dikepalai oleh seorang *Gallarang*. Khusus untuk orang-orang Cina diperintah oleh pejabat yang disebut *major cina* yang dibantu *wijkmeesters*. Demikian pula orang-orang Asia Timur yang mempunyai pemimpin sendiri yang digelar *Kapitein* (Paeni, dkk. 1984: 10). Nama-nama distrik tersebut mencerminkan asal penghuninya, kecuali distrik Ujung Tanah dan Mariso. Pada tahun 1921 Distrik Melayu dan Distrik Ende dihapuskan. Distrik Melayu seluruhnya digabungkan kedalam Distrik Wajo, sedangkan bekas wilayah Distrik Ende dibagi ke dalam wilayah Distrik Makassar dan Distrik Wajo. Setelah tahun 1921 hanya ada empat distrik yaitu Distrik Makassar, Distrik Wajo, Distrik Ujung Tanah dan Distrik Mariso (Asmunandar, 2008: 54).

Distrik Makassar secara geografis terletak di tengah kota, meliputi daerah sekitar Fort Rotterdam, Karebosi dan Rumah Sakit Pelamonia. Distrik lain berada di sebelah utara Fort Rotterdam terdapat Distrik Wajo (gabungan dengan Distrik Melayu), meliputi daerah *Vlaardingen*, Kampung Melayu dan Kampung Wajo

sendiri. Distrik Ujung Tanah sesuai dengan namanya merupakan wilayah kota di ujung pantai utara (sisi utara Distrik Wajo). Adapun Distrik Mariso meliputi bagian di sebelah selatan Fort Rotterdam (Asmunandar, 2008: 54).

Pengelompokan distrik tersebut, terlihat jelas berdasarkan pada status sosial dan suku penduduk. Bagian tengah atau Distrik Makassar, mulai dari awal pertumbuhan kota merupakan daerah elit untuk kegiatan pemerintahan dan dihuni oleh orang-orang Belanda. Distrik Wajo, dihuni oleh orang-orang Cina dan makin ke utara sampai Distrik Ujung Tanah berupa kampung-kampung dihuni oleh penduduk pribumi. Distrik Mariso meliputi Kampung Baru dan sekitarnya, sejak mula berkembang menjadi kampung-kampung pribumi, pada umumnya dari luar Pulau Sulawesi. Sama dengan beberapa tempat lain, nama asal penduduk digunakan untuk nama kampung. Maka, selain Kampung Baru disana terdapat Kampung Jawa, Kampung Maluku, Kampung Galesong dan lain-lain. Bangunan-bangunan pada daerah utara Distrik Mariso atau bagian Kampung Baru lebih baik dari kawasan di bagian selatan dimana dihuni oleh pendatang dengan rumah-rumah yang terbuat dari bambu (Asmunandar, 2008: 55).

Periode berikutnya adalah periode peralihan yaitu perubahan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kemudian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Periode peralihan ini tidak banyak perubahan kecuali beberapa bangunan yang didirikan oleh Jepang yaitu bangunan yang difungsikan sebagai rumah tinggal dan beberapa bangunan di dalam Fort Rotterdam.

Selanjutnya, pada masa awal kemerdekaan struktur tata ruang kota mengalami perubahan ketika walikota Makassar pada saat itu dijabat oleh H.M. Patompo. Diawali dengan sebuah visi yang melahirkan rencana dan sasaran pembangunan jangka panjang bertajuk “Kota Lima Dimensi” meliputi: Kota Dagang, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Akademi, dan Kota Pariwisata. Walikota kemudian mengupayakan perluasan wilayah kota ke arah utara (Kabupaten Maros) dan ke arah timur (Kabupaten Gowa), sehingga luas kota yang berubah menjadi 175 km<sup>2</sup> yang sebelumnya hanya seluas 21 km<sup>2</sup>. Berdasarkan *master plan* yang dirancang pada masa ini, Kota Makassar dibagi atas Kawasan Kota Lama sebagai kawasan perdagangan, Kawasan Panakukkang sebagai kawasan perkantoran dan pemukiman atau Panakkukang Garden City, Kawasan

Biringkanaya Timur sebagai kawasan pendidikan, Kawasan Biringkanaya Utara sebagai kawasan industri, Kawasan Mariso di selatan kota dan pulau-pulau di sekitar Selat Makassar sebagai kawasan pariwisata. Pada masa ini, dilakukan pembenahan jaringan jalan dengan adanya jalan lingkaran luar (*outer ring road*) barat yaitu Jalan R.E. Martadinata – Ujung Pandang – Pasar Ikan - Cendrawasih, jalan lingkaran dalam (*inner ring road*) yaitu Jalan Slamet Riyadi - Sultan Hasanuddin - Arif Rate - Cendrawasih, serta jalan lingkaran tengah (*middle ring road*) yaitu Jalan H.O.S. Cokroaminoto - Jenderal Sudirman - Ratulangi. Penambahan jaringan jalan yaitu *inner ring road* Jalan Bandang - Sungai Jeneberang (Veteran) - Kumala dan *outer ring road* di bagian timur yaitu Jalan A.P. Pettarani - Syekh Yusuf (Abdullah Daeng Sirua) hingga ke PLTU Tello Baru. Pembenahan kondisi permukiman juga digalakkan pada periode ini, yaitu: Kelurahan Pannambungan dan Lette yang sebelumnya tampak kumuh ditata kembali dan berubah menjadi kompleks perumahan baru, serta permukiman Ujung Pandang Baru. Demikian halnya dengan pembangunan tanggul untuk membebaskan warga Mariso dari ancaman banjir tahunan (Ahmadin, 2008: 9-10). Proyek pembangunan lain adalah pusat pertokoan yang berada di sekitar Pasar Sentral dan di Jalan Sombaopu.



Foto 4.21 Sarana transportasi dalam kota yang memanfaatkan *Hoogepaad* (Karebosi) sebagai tempat “terminal”, Tahun 1924  
Sumber: KITLV, 2010



Foto 4.22 Prasarana Transportasi “Terminal Regional Daya”.  
Sumber: Profil Kota Makassar, 2010: 13

Perubahan lain adalah dibangunnya pusat perekonomian di bekas lahan perkuburan Tionghoa yang saat itu dikenal dengan Pasar Sentral yang



berdampingan dengan Terminal Angkutan antar kota. Jika lapangan karebosi sebagai titik pusat kota, maka kedua lokasi tersebut berjarak  $\pm 500$  m dari lapangan Karebosi. Pada perkembangan selanjutnya, terminal tersebut telah mengalami dua kali perpindahan ke arah timur diantaranya ke daerah *Panaikang* ( $\pm 7$  km dari titik pusat kota) dan terakhir ke daerah *Daya* ( $\pm 15$  km dari titik pusat kota). Akibat perpindahan tersebut perkuburan etnis Tionghoa juga mengalami dua kali perpindahan diantaranya ke daerah *Panaikang* berdampingan dengan Terminal dan kemudian akibat pembangunan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dipindahkan lagi ke daerah yang saat ini dikenal dengan nama *Antang* (arah tenggara  $\pm 15$  km dari titik pusat kota). Dengan demikian, jika berdasar pada lokasi penempatan terminal dan perkuburan yang cenderung ditempatkan di pinggiran kota maka tampak bahwa perkembangan kota telah mengalami perkembangan ke arah timur pada kedua lokasi tersebut. Sementara itu, pusat perekonomian, yaitu *Pasar Sentral* saat ini masih bertahan, meski demikian pusat-pusat perekonomian telah berubah ke bentuknya yang baru dengan adanya pusat-pusat perbelanjaan yang tersebar di dalam kota.

Demikian halnya dengan daerah-daerah pemukiman tumbuh seiring dengan laju pertumbuhan kota disertai proses urbanisasi yang meningkat. Semakin besarnya kesempatan kerja dan peran Makassar sebagai pusat pendidikan di Indonesia bagian timur mempercepat laju pertumbuhan penduduk. Daerah-daerah pemukiman pada awalnya masih berada di sekitar pusat kota kini telah berkembang ke arah pinggiran kota. Saat ini, Kota Makassar memiliki luas 175,77 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 14 kecamatan dan 143 kelurahan, kecamatan tersebut yaitu: Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Panakkukang, Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, Ujung Pandang, Makassar, Rappocini, Tamalate, Mamajang, Mariso, dan Mariso.

Pengembangan struktur tata ruang kota yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015. Kebijakan ini didasarkan pada visi pembangunan Kota Makassar, yaitu "Mewujudkan Kompetensi Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, yang Bermartabat dan Manusiawi". Visi pembangunan ini sekaligus diarahkan pada pengembangan Kota Makassar sebagai Kota Dunia di masa depan.

Kebijakan ini mengarahkan pengembangan kota metropolitan dengan konsep “Mamminasata”, pengembangan wilayah kota yang menghubungkan dan saling bersinergi dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, yaitu Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Konsep ini terbentuk dari perkembangan Makassar yang demikian pesat, sehingga terdapat aglomerasi dengan tiga kota lainnya (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2005: 10).

Kebijakan tentang pengembangan wilayah disesuaikan dengan karakteristik fisik dan perkembangan Kota Makassar yang dibagi atas lima wilayah pengembangan dengan tiga belas kawasan terpadu dan tujuh kawasan khusus. Kelima wilayah pengembangan tersebut, sebagai berikut:

- a. Wilayah Pengembangan (WP) I di bagian atas Sungai Tallo, tepatnya di bagian Utara dan Timur Kota, dengan dasar kebijakan utamanya diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi-fungsi kawasan yang berbasiskan pada pengembangan infrastruktur dasar ekonomi perkotaan melalui pengembangan kegiatan secara terpadu seperti pengembangan fungsi dari sektor industri dan perdagangan, pusat kegiatan perguruan tinggi, pusat penelitian, bandar udara yang berskala internasional, kawasan maritim dan pusat kegiatan penelitian sebagai sentra primer baru bagian Utara Kota;
- b. Wilayah Pengembangan (WP) II di bagian bawah Sungai Tallo, tepatnya dibagian Timur dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan batas bagian bawah dari Sungai Tallo, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan pemukiman perkotaan secara terpadu dalam bingkai pengembangan sentra primer baru bagian Timur Kota;
- c. Wilayah Pengembangan (WP) III Pusat Kota, tepatnya berada pada sebelah Barat dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan Pantai Losari dan batas bagian atas dari Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga), dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada kegiatan revitalisasi Kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan pemerintahan serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan Kota yang tersedia dengan tanpa mengubah dan mengganggu kawasan dan atau bangunan cagar budaya;

- d. Wilayah Pengembangan (WP) IV di bagian bawah Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga), tepatnya batas bagian bawah dari Sungai Balang Beru sampai dengan batas administrasi Kabupaten Gowa, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan secara terpadu untuk pusat kegiatan kebudayaan, pusat bisnis global terpadu yang berstandar internasional, pusat bisnis dan pariwisata terpadu dan pusat olahraga terpadu yang sekaligus menjadi sentra primer baru bagian Selatan Kota;
- e. Wilayah Pengembangan (WP) V Kepulauan Spermonde Makassar, dengan dasar kebijakan utamanya yang diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2005: 11-12).

Selanjutnya, berdasarkan wilayah pengembangan serta kawasan terpadu dan kawasan khusus yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut, kemudian dilakukan perencanaan jaringan jalan yang menghubungkan masing-masing wilayah dan kawasan.

Berdasarkan uraian tentang karakteristik pertumbuhan Kota Makassar sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Karakteristik historiografi memberi gambaran bahwa Kota Makassar tumbuh dan berkembang sebagai kota pantai yang berperan sebagai bandar transit di jalur perdagangan internasional di masa lalu. Oleh karena itu, Museum Kota Makassar harus berperan dalam menampilkan identitas masa lalu Kota Makassar sebagai kota perdagangan. Karakteristik ini sekaligus memiliki keterhubungan dengan arah masa depan Kota Makassar yang saat ini diwacanakan yaitu mengembangkan Kota Makassar sebagai Kota Dunia.
- b. Karakteristik sosial budaya menunjukkan bahwa Kota Makassar tumbuh dan berkembang sebagai kota heterogen yang multietnis dan multikultur. Oleh karena itu, Museum Kota Makassar harus berperan sebagai lembaga yang

dinamis atau mekanisme kultural dalam upaya rekonsiliasi warga kota yang beragam.

- c. Karakteristik morfologi kota memperlihatkan bahwa Kota Makassar tumbuh dan berkembang sebagai kota pra-modern dan kota modern pada masa kolonial dan masa kemerdekaan, hingga terbentuk sebagai kota metropolitan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Museum Kota Makassar harus berperan mengkomunikasikan pertumbuhan dan perkembangan kota hingga terbentuk sekarang ini.



## **BAB 5**

### **KONSTRUKSI BARU PAMERAN MUSEUM KOTA MAKASSAR**

Pengembangan pameran sebuah museum didasarkan pada objektif yang ingin dicapai yaitu visi dan misi. Dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perubahan paradigma museum saat ini lebih mengarahkan objektif museum pada pengembangan masyarakat. Perubahan paradigma yang diidentifikasi sebagai konsep ideal museum baru melakukan inovasi terhadap unsur-unsur pembentuk institusi museum, di antaranya; objektif, prinsip dasar, struktur dan organisasi, pendekatan, dan tugas-tugas. Dengan demikian, pembahasan tentang konstruksi baru pameran Museum Kota Makassar akan berpengaruh terhadap unsur-unsur lain khususnya pada objektif dan prinsip dasar pengelolaan. Oleh karena penelitian ini lebih difokuskan pada pameran, maka pembahasan terhadap unsur-unsur pembentuk lain tidak dibahas pada konstruksi baru yang diajukan.

Selanjutnya, pembahasan tentang konstruksi baru pameran Museum Kota Makassar didasarkan pada konsep museum kota sebagaimana diuraikan pada pembahasan tentang definisi dan peran museum kota. Dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat dua pendekatan untuk mengidentifikasi sebuah kota, yaitu pada aspek fisik dan sosial. Aspek penting lain adalah museum kota harus dipandang sebagai mekanisme kultural yang dapat melayani masyarakat perkotaan, dan merupakan lembaga yang mampu mengkoordinasikan perdamaian dari masyarakat perkotaan yang beragam. Berdasarkan definisi dan peran tersebut, aspek penting terkait dengan pameran museum kota adalah memperhatikan aspek fisik dan sosial perkotaan. Aspek fisik berkaitan dengan struktur tata ruang kota, agar museum mampu berperan memberikan pemahaman kepada warga kota tentang perubahan fisik kota serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Sementara itu, aspek sosial berkaitan dengan peran museum kota untuk memberi pemahaman dalam membangun perdamaian masyarakat perkotaan yang beragam.

Pembahasan tentang konstruksi baru pameran Museum Kota Makassar dimulai dengan uraian tentang unsur tema pameran sebagaimana dibahas pada kerangka teoretis dan selanjutnya dilakukan sintesa terhadap karakteristik

pertumbuhan kota Makassar. Selanjutnya, uraian tentang tema pameran dan bentuk penyajian.

## **5.1 Unsur Tema Pameran Museum Kota Makassar**

Unsur tema sebagaimana pembahasan pada bab dua, terdiri atas: awal pertumbuhan kota, identitas masyarakat, aspek budaya dan sosial perkotaan, dan struktur tata ruang kota. Berdasarkan unsur-unsur tersebut kemudian dilakukan sintesa terhadap karakteristik pertumbuhan kota Makassar sebagaimana pembahasan pada bab empat. Hasil akhir dari sintesa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh sebuah konstruksi baru pameran Museum Kota Makassar yang diajukan.

### **5.1.1 Awal Pertumbuhan Kota**

Unsur tema yang terkait dengan awal pertumbuhan kota dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang bagaimana awal terbentuknya sebuah kota serta informasi tentang faktor-faktor yang melatari pembentukannya. Dalam kaitannya dengan karakteristik pertumbuhan kota Makassar tampak bahwa awal pertumbuhan kota Makassar muncul sebagai tipe negara-kota pantai (*city state*). Menurut Reed (1976), tipe negara-kota pantai menjalankan fungsinya sebagai pusat-pusat pasar yang menghubungkan jaringan perdagangan laut. Tipe ini untuk membedakan tipe kota-kota pedalaman yang disebut dengan istilah “kota suci” (*sacred city*). Tipe ini lebih menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan politik dan keagamaan (Supratikno Rahardjo, 2007: 39-40). Oleh karena itu, kaitannya dengan pameran Museum Kota Makassar, unsur tema tentang awal pertumbuhan kota yang dapat ditampilkan adalah proses terbentuknya Makassar, peran Makassar dan proses keruntuhan. Dalam hal ini, proses keruntuhan yang dimaksudkan adalah terjadinya konflik yang kemudian menyebabkan perpindahan pusat kekuasaan serta perubahan pemegang kekuasaan.

Dengan demikian, tema yang terkait dengan sejarah terbentuknya kota adalah unsur penting yang harus ditampilkan museum kota. Unsur ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang bagaimana sebuah kota terbentuk serta informasi tentang sejarah yang melatarinya. Setiap kota tentunya

memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan sejarah kota yang lain. Unsur tema ini sekaligus menjadi sebuah pengantar bagi pengunjung museum untuk memahami awal terbentuknya sebuah kota.

### **5.1.2 Identitas Masyarakat Kota Makassar**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan kerangka teoretis bahwa konsep identitas berada pada dua tataran yaitu tataran teknis dengan adanya padanan kata “identik” dan pada tataran konseptual yang memiliki pengertian upaya untuk mengidentifikasi sesuatu. Dengan demikian, informasi yang penting untuk ditampilkan oleh museum adalah identitas sejarah yaitu berkaitan dengan peran Makassar sebagai kota perdagangan di masa lalu. Peran lain terkait dengan peran Makassar pada masa kemerdekaan atau terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, identitas yang terkait dengan karakteristik kultural masyarakat Makassar. Terakhir, adalah identitas masyarakat kota Makassar yang terdiri atas berbagai latar belakang etnis dan agama, hal ini dimaksudkan untuk menampilkan heterogenitas warga kota Makassar.

### **5.1.3 Aspek Budaya dan Sosial Perkotaan**

Budaya kota dikaitkan dengan usaha-usaha warga kota dalam memanfaatkan suatu ruang, sarana dan prasarana kota, selain itu sering dikaitkan dengan peradaban yang dicirikan dengan perkembangan sosio-kultural, teknologi dan modernisasi. Oleh karena itu, budaya kota sangat terkait dengan perilaku-perilaku warga kota yang bertujuan untuk memajukan peradaban kotanya. Tujuan lain adalah bagaimana secara kualitatif warga kota memperhatikan keberlangsungan lingkungan perkotaan. Aspek lain pada unsur tema ini adalah sosial perkotaan yang terkait dengan permasalahan sosial yang timbul akibat hubungan sosial antar warga kota, serta aspek demografis perkotaan.

Dalam kaitannya dengan karakteristik pertumbuhan kota Makassar, unsur tema budaya kota tampak pada perkembangan kota Makassar yaitu Makassar sebagai kota kolonial dan Makassar sebagai kota modern setelah masa kemerdekaan. Tentunya, terdapat perbedaan pada kedua masa tersebut, sarana dan prasarana kota yang telah dibangun oleh bangsa Eropa menciptakan budaya kota

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, masa kemerdekaan tentunya memiliki ciri tersendiri yaitu bagaimana warga kota memanfaatkan sarana dan prasarana yang diwariskan pada masa sebelumnya. Kota Makassar sebagai kota modern saat ini telah berkembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Tentunya perkembangan kota menciptakan ciri khusus bagi budaya kota yang memiliki karakteristik tersendiri. Dengan demikian, poin utama pentingnya menampilkan budaya kota oleh museum adalah sebagai upaya menstimulasi warga kota dalam memajukan peradaban dan lingkungan kotanya.

#### **5.1.4 Struktur Tata Ruang Kota**

Struktur tata ruang kota terkait dengan perubahan fisik yang tampak dengan adanya pembangunan jaringan jalan, bangunan kantor maupun tempat tinggal, jaringan kanal, taman kota serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang kehidupan warga kota. Dengan demikian, perubahan fisik adalah unsur utama perkembangan sebuah kota, hal inilah yang mendasari pentingnya menampilkan informasi terkait dengan morfologi kota. Pemahaman tentang perubahan fisik kota dan faktor-faktor yang melatarinya penting disampaikan kepada publik agar memperoleh pengetahuan tentang perubahan fisik kota dalam sudut pandang yang lebih luas. Informasi ini juga bermanfaat bagi pihak perencana kota dalam mengambil kebijakan perencanaan kota.

Dalam kaitannya dengan karakteristik pertumbuhan kota Makassar, unsur tema tentang struktur tata ruang kota ditampilkan perubahan struktur tata ruang kota, elemen-elemen yang membentuk struktur tata ruang kota serta faktor-faktor yang melatarinya. Perubahan struktur tata ruang kota Makassar tampak pada awal pertumbuhan kota Makassar yaitu pada masa pra-kolonial. Pada awalnya, wilayah Kota Makassar saat ini adalah bagian dari wilayah dua kerajaan kembar Gowa-Tallo yang kemudian disebut dengan Kerajaan Makassar. Wilayah Kerajaan Gowa berpusat di Somba Opu di sekitar sungai Jeneberang dan wilayah Kerajaan Tallo berpusat di sekitar sungai Tallo di bagian utara. Pada saat itu, wilayah Kota Makassar saat ini hanya terdiri dari gugusan benteng serta pemukiman (kampung) di daerah pesisir yang membentang dari sungai Jeneberang di bagian selatan dan sungai Tallo di bagian utara. Perubahan signifikan kemudian terjadi ketika



penaklukan Belanda (VOC) atas wilayah ini dengan merebut benteng Ujung Pandang (*Fort Rotterdam*) yang berada di pusat kota saat ini dan menjadikan benteng tersebut sebagai pusat aktivitas. Perubahan lain yang cukup signifikan terjadi pada masa kemerdekaan.

## 5.2 Tema dan Bentuk Penyajian Pameran

Berdasarkan unsur-unsur tema sebagaimana pembahasan sebelumnya, tema pameran kemudian dapat dirumuskan. Pengembangan sebuah pameran yang akan ditampilkan oleh museum pada dasarnya adalah sebuah hasil interpretasi agar aspek edukasi dapat tersampaikan kepada pengunjung. Dalam hal ini interpretasi yang dilakukan harus bersifat: dapat bercerita, berisi narasi dan bukan merupakan daftar fakta-fakta, serta bersifat melayani. Sifat pelayanan sebuah interpretasi adalah dengan menjelaskan, memandu, menginformasikan, atau berdampak signifikan secara positif bagi pengunjung. Dengan demikian, hasil interpretasi memberi pemahaman bahwa profesional museum tidak lagi memamerkan objek, akan tetapi telah menyampaikan makna kepada pengunjung. Dalam konteks ini, memberi pemahaman bahwa tema yang ditampilkan adalah wujud fisik atau aspek *tangible* dan signifikansi tema adalah aspek *intangible* sebuah pameran (Noerhadi Magetsari, 2009: 8).

Pada dasarnya, hasil interpretasi sebuah museum kota merupakan interpretasi terhadap proses pertumbuhan kota serta proses perubahan yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Hasil interpretasi tersebut sekaligus upaya museum untuk menjelaskan masyarakat kota serta proses dan faktor yang melatarinya (Hebditch, 1995: ). Dalam kaitannya dengan kajian perkotaan, para ahli menyebut bahwa untuk menjelaskan pertumbuhan kota dapat dilakukan dengan kajian diakronik (Supratikno Rahardjo, 2007: 52). Dalam hal ini, pertumbuhan kota dikaji berdasarkan tahap-tahap perkembangan sebuah kota. Oleh karena itu, untuk tujuan tersebut, secara umum tema pameran pada konstruksi baru pameran Museum Kota Makassar disusun berdasarkan kajian diakronik. Tema pameran dimaksud adalah: Pengantar, Awal Pertumbuhan Kota Makassar, *Gemeente van Makassar*, Makassar membentuk NKRI, Perluasan Wilayah dan Arus Urbanisasi,

Heterogenitas Makassar, Makassar Terkini, Makassar dalam Peta, dan Mengenang Makassar.

Tabel 5.1 Konsep Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar

No.	Tema Pameran	Isi Pameran yang disampaikan	Signifikansi Tema
1.	Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman tentang kata Makassar berdasarkan berbagai Perspektif</li> <li>2. Potensi kultural masyarakat Bugis-Makassar</li> <li>4. Penetapan hari jadi dan sejarah perubahan nama kota.</li> </ol>	Sebagai pengantar untuk memahami Makassar dan menstimulasi semangat reflektif warga kota
2.	Awal Pertumbuhan Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyatuan dua kerajaan: Gowa dan Tallo</li> <li>2. Peran Makassar sebagai bandar niaga</li> <li>3. Konflik siri'</li> <li>4. Perpindahan pusat kekuasaan</li> </ol>	Pemahaman tentang pertumbuhan Makassar masa Kerajaan Gowa-Tallo
3.	Gemeente van Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fort Rotterdam sebagai elemen awal pembentukan kota kolonial</li> <li>2. Elemen pembentukan kota</li> <li>3. Kehidupan sosial</li> <li>4. Fasilitas kota</li> </ol>	Pemahaman tentang pertumbuhan Makassar masa kolonial
4.	Makassar Membentuk NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT)</li> <li>2. Makassar sebagai Ibukota Republik Indonesia Serikat (RIS)</li> <li>3. Perjanjian Malino</li> </ol>	Pemahaman tentang peran Makassar dalam membentuk NKRI
5.	Perluasan Wilayah dan Arus Urbanisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan Wilayah Administratif</li> <li>2. Proses Urbanisasi</li> </ol>	Pemahaman tentang perluasan wilayah dan proses urbanisasi
6.	Heterogenitas Makassar	Etnis-etnis yang mendiami Kota Makassar	Pemahaman tentang terbentuknya heterogenitas Kota Makassar
7.	Makassar Terkini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan Misi Kota Makassar</li> <li>2. Bangunan Fisik</li> <li>3. Budaya Masyarakat Kota</li> </ol>	Pemahaman tentang kondisi kekinian Kota Makassar
8.	Makassar dalam Peta	Perkembangan Pemanfaatan Ruang Kota Makassar	Proses pertumbuhan fisik Kota Makassar
9.	Mengenang Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkaitan dengan Peristiwa</li> <li>2. Berkaitan dengan Tempat</li> </ol>	Menstimulasi kenangan warga kota

Tabel 5.2 Konsep Konstruksi Baru Bentuk Penyajian Pameran Museum Kota Makassar

No.	Tema Pameran	Isi Pameran yang disampaikan	Bentuk Penyajian
1.	Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman tentang kata Makassar berdasarkan berbagai Perspektif</li> <li>2. Potensi kultural masyarakat Bugis-Makassar</li> <li>3. Penetapan hari jadi dan sejarah perubahan nama kota.</li> </ol>	Narasi dan Film Dokumenter
2.	Awal Pertumbuhan Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyatuan dua kerajaan: Gowa dan Tallo</li> <li>2. Peran Makassar sebagai bandar niaga</li> <li>3. Konflik siri'</li> <li>4. Perpindahan pusat kekuasaan</li> </ol>	Narasi, Foto, Lukisan, Peta, dan Miniatur
3.	Gemeente van Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fort Rotterdam sebagai elemen awal pembentukan kota kolonial</li> <li>2. Elemen pembentukan kota</li> <li>3. Kehidupan sosial</li> <li>4. Fasilitas kota</li> </ol>	Narasi, dan Foto
4.	Makassar Membentuk NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT)</li> <li>2. Makassar sebagai Ibukota Republik Indonesia Serikat (RIS)</li> <li>3. Perjanjian Malino</li> </ol>	Narasi dan Diorama
5.	Perluasan Wilayah dan Arus Urbanisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan Wilayah Administratif</li> <li>2. Proses Urbanisasi</li> </ol>	Narasi, Peta, dan <i>Audio Record</i>
6.	Heterogenitas Makassar	Etnis-etnis yang mendiami Kota Makassar	Narasi dan Foto
7.	Makassar Terkini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan Misi Kota Makassar</li> <li>2. Bangunan Fisik</li> <li>3. Budaya Masyarakat Kota</li> </ol>	Narasi dan <i>Audio Record</i>
8.	Makassar dalam Peta	Perkembangan Pemanfaatan Ruang Kota Makassar	Narasi dan <i>Audio Visual</i>
9.	Mengenang Makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkaitan dengan Peristiwa</li> <li>2. Berkaitan dengan Tempat</li> </ol>	Narasi dan Foto

Dengan demikian, pilihan terhadap sudut pandang penerapan museologi terhadap penyajian pameran adalah positivistik. Sudut pandang positivistik, memberi alternatif kepada ahli museologi untuk menyajikan pesan dengan mengatur pengunjung untuk bergerak mengikuti alur penyajian (selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5.1). Penyajian ini sekaligus memberi pemahaman kepada pengunjung bahwa semangat reflektif pameran diarahkan pada upaya rekonsiliasi visi Kota Makassar menuju Kota Dunia. Pemahaman ini

dimaksudkan bahwa peran Makassar sebagai bandar internasional di masa lalu akan direfleksikan untuk arah pembangunan Kota Makassar di masa depan.

Uraian berikut ini berisi tentang tema pameran dan isi pameran yang disampaikan. Sementara itu, media penyajian dapat berupa artefak, bukti-bukti lingkungan, catatan tentang tempat atau aktivitas, serta testimoni. Berdasarkan keempat jenis koleksi ini museum kota diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang perubahan kota. Dengan demikian, bentuk penyajian informasi berupa objek atau benda, foto, narasi, maupun media audio-visual.

### 5.2.1 Pengantar

Sesuai dengan penamaan pada tema ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk memperoleh pemahaman tentang Makassar. Dalam hal ini, pemahaman yang penting untuk disampaikan adalah kata “Makassar” itu sendiri. Kata “Makassar” sebagaimana disebutkan oleh Mattulada (1982), berdasarkan tradisi lisan berasal dari kata “*Makkasariki Nabiya*” yang berarti Nabi menampakkan/menjelamkan diri. Perspektif lain tentang kata “Makassar” adalah yang menyebut Makassar sebagai salah satu grup etnis di Sulawesi Selatan, Makassar sebagai sebutan untuk Kerajaan Gowa-Tallo, Makassar sebagai bandar niaga, serta Makassar sebagai nama kota. Informasi singkat lain adalah Makassar sebagai penamaan selat yang memisahkan pulau Sulawesi dan Kalimantan serta penamaan sebuah pulau yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemahaman lain adalah sejarah Kota Makassar yang saat ini telah berusia lebih dari empat abad (402 tahun), sangat penting untuk diinformasikan oleh museum kepada warga kota. Pemahaman ini berkaitan dengan informasi tentang penetapan hari jadi Kota Makassar yang bertepatan dengan peristiwa deklarasi Kerajaan Gowa-Tallo yang menetapkan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Deklarasi tersebut berlangsung pada hari Jum’at 19 Bulan Rajab 1016 Hijriyah atau 9 November 1607. Saat ini, informasi tentang penetapan hari jadi Kota Makassar disertai alasan penetapannya tidak menjangkau semua lapisan masyarakat dan hanya menjadi pengetahuan para sejarawan serta mereka yang tertarik akan historiografi Makassar. Demikian halnya tentang informasi perubahan nama kota dari Makassar yang kemudian berubah menjadi Ujung

Pandang dan selanjutnya kembali menggunakan nama Makassar. Informasi penting lainnya adalah alasan yang melatarinya perubahan nama tersebut. Tentunya informasi ini dapat menjelaskan kepada pengunjung museum baik warga kota maupun pengunjung yang datang dari luar kota tentang perubahan nama dan alasan yang melatarinya. Pemahaman tentang alasan yang melatarinya perubahan nama tersebut sekaligus memuat informasi kepada publik tentang penggunaan Makassar (yang juga adalah nama salah satu etnis di Sulawesi Selatan) sebagai nama Kota (yang sekaligus adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Tidak dapat dipungkiri bahwa publik masih menyimpan tanda tanya tentang penamaan Makassar terlebih bagi etnis lain yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perlu penjelasan dan pemahaman tentang latar belakang penamaan tersebut.

Informasi selanjutnya adalah pemahaman tentang konsep *siri'* sebagai falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar. Informasi ini penting untuk memberi pemahaman bahwa falsafah hidup inilah yang melatarinya berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa lalu maupun masa sekarang ini. Pemahaman terhadap konsep *siri'* diharapkan dapat menstimulasi warga kota Makassar untuk memahami potensi kultural mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Hal penting lain adalah budaya *siri'* harus diarahkan pada upaya menjaga kehormatan untuk menuju peradaban kota yang lebih maju. Fenomena yang sering terjadi di Makassar saat ini disebabkan karena konsep *siri'* yang dipahami secara dangkal oleh warga kota. Peristiwa kekerasan yang melibatkan warga kota atau sebuah komunitas tertentu sering terjadi karena adanya persinggungan *siri'* dalam konteks pribadi yang kemudian memunculkan *pesse'* atau *pacce* di antara anggota komunitas tersebut yang akhirnya memunculkan *siri'* komunitas. Dalam konteks inilah, peran mediasi dan advokasi Museum Kota Makassar harus dimunculkan, bahwa pemahaman dangkal terhadap konsep *siri'* yang terbatas pada *siri'* pribadi maupun komunitas hanya memunculkan dampak negatif.

Informasi lain terkait dengan potensi kultural yang dapat memunculkan semangat reflektif adalah tujuh elemen yang dimiliki manusia Bugis-Makassar dalam menghadapi modernitas. Tujuh elemen tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Christian Pelras (1998), dalam menjelaskan proses modernitas di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, di antaranya; pemikiran rasional, peningkatan

aktivitas produksi, spesialisasi keahlian, keluasan komunikasi, keterbukaan budaya, hubungan sosial, dan keutamaan individual. Semangat reflektif tersebut diharapkan menjadi potensi kultural yang dapat menstimulasi warga kota dalam menghadapi perkembangan modernisasi.



Foto 5.1 Contoh Penyajian Pameran Museum Ayala  
Sumber: Ayala Foundation, 2010: 3

Bentuk penyajian berupa narasi yang menjelaskan kata “Makassar” berdasarkan berbagai perspektif, penetapan hari jadi, dan sejarah perubahan nama kota. Selanjutnya adalah narasi yang menjelaskan potensi kultural tentang konsep *siri' na pacce* (*pesse'*) dan tujuh elemen yang dimiliki oleh masyarakat Bugis-Makassar. Bentuk penyajian ini dilengkapi dengan pemutaran film yang berisi pementasan fragmen yang menggambarkan pemahaman tentang konsep *siri'*. Penyajian ini diakhiri dengan narasi yang berisi pesan untuk menjaga citra Makassar ke arah yang lebih positif.



Foto 5.2 Contoh Penyajian yang Menampilkan Informasi  
Sumber: *Point Concept*, 2010

### 5.2.2 Awal Pertumbuhan Kota Makassar

Tema ini dimaksudkan untuk memahami titik awal pembentukan Kota Makassar berdasarkan perjalanan sejarahnya. Isi pameran yang disampaikan adalah penyatuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo sebagai kerajaan kembar, Makassar sebagai bandar niaga, konflik yang menyebabkan kejatuhan Makassar, dan perpindahan pusat kekuasaan.

Isi pameran tentang penyatuan dua kerajaan kembar Gowa-Tallo dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang titik awal pertumbuhan bandar Makassar yang berperan penting dalam perdagangan Nusantara abad XVI-XVII. Peristiwa ini terjadi pada masa kekuasaan *Tumapa'risi' Kallonna*, dengan adanya pengaturan kekuasaan yang menyebutkan Raja Tallo menjabat Mangkubumi (penasehat raja) Raja Gowa. Pengaturan kekuasaan menjadikan dua kerajaan tersebut memiliki “dua penguasa dan satu rakyat” (*rua karaeng na se're' ri ata*). Pemahaman ini dapat dimaknai sebagai tonggak awal persatuan yang melahirkan masa kejayaan bandar Makassar sebagai pusat perdagangan di masa lalu. Isi pameran selanjutnya adalah pemahaman tentang peran Makassar sebagai bandar niaga. Penyajian isi pameran ini adalah informasi tentang masa perdagangan yang menampilkan keadaan masa tersebut yaitu peran Sombaopu sebagai pusat pemerintahan serta komoditi perdagangan dan jenis-jenis kapal sebagai sarana transportasi utama pada masa tersebut. Selanjutnya, pameran menampilkan proses keruntuhan pusat pemerintahan Sombaopu yang berawal dari konflik penguasa lokal yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Penting untuk menjelaskan proses keruntuhan Kerajaan Gowa-Tallo disertai dengan informasi yang melatarbelakangi konflik tersebut. Konflik ini pada dasarnya bukanlah bentuk pertentangan antara etnis Bugis dan etnis Makassar. Konflik ini lebih mengarah pada konflik antara persekutuan kerajaan-kerajaan yang saling melibatkan kedua etnis tersebut, yaitu persekutuan antara Kerajaan Bone, Soppeng, Siang serta Turatea (etnis Makassar) serta Kerajaan Gowa-Tallo yang bersekutu dengan kerajaan-kerajaan etnis Bugis yaitu Luwu, dan Wajo. Penting pula dikemukakan bahwa konflik ini adalah sebuah bentuk pertentangan yang diawali dengan pertentangan *siri'* di antara persekutuan kerajaan-kerajaan tersebut. Pemahaman ini penting disampaikan agar masyarakat dapat memaknai

peristiwa tersebut dan tidak mengarah pada konflik lanjutan. Isi pameran diakhiri dengan menampilkan informasi tentang perpindahan pusat pemerintahan dan kekuasaan dari Sombaopu (penguasa Gowa) ke Ujungpandang/*Fort Rotterdam* (VOC). Dengan demikian, informasi tersebut melengkapi pemaknaan terhadap peristiwa keruntuhan Makassar bahwa konflik yang terjadi memunculkan penguasa baru yaitu VOC (Belanda).

Bentuk penyajian berupa narasi tentang penyatuan dua kerajaan kembar yang kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa perdagangan Nusantara. Narasi lain yang ditampilkan adalah informasi tentang jenis-jenis komoditi yang diperdagangkan. Demikian halnya narasi tentang konflik yang menyebabkan kejatuhan Makassar serta perpindahan pusat kekuasaan. Penyajian pada tema ini disertai dengan penyajian visual tentang lukisan yang menggambarkan konflik pada saat itu. Penyajian visual lain adalah lukisan yang menggambarkan situasi dan kondisi benteng Sombaopu sebagai pusat pemerintahan pada saat itu. Penyajian juga menampilkan peta kuno yang menggambarkan peta jalur perdagangan dan posisi gugusan benteng yang membentang antara pusat Kerajaan Gowa di sekitar sungai Jeneberang dan pusat Kerajaan Tallo di sekitar sungai Tallo. Penyajian ini juga menampilkan objek berupa miniatur jenis-jenis kapal yang digunakan sebagai sarana transportasi perdagangan pada masa tersebut. Penyajian objek ini disertai dengan narasi yang menjelaskan konstruksi kapal dan fungsi masing-masing jenis kapal tersebut.



Foto 5.3 Contoh Penyajian Pameran Tetap “*Museum of London*”  
Sumber: *Museum Of London*, 2010





Foto 5.4 Salah Satu Penyajian di Museum Bank Indonesia yang Menampilkan Miniatur Kapal  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2010

### 5.2.3 Gemeente van Makassar

Tema ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pertumbuhan kota pada masa kolonial. Penamaan pada tema ini adalah berdasarkan status kota Makassar yang ditetapkan sebagai kota otonomi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1903. Penetapan status ini setelah beberapa abad penaklukan VOC pada masa itu terhadap Kerajaan Gowa-Tallo. Penamaan tersebut lebih dimaksudkan untuk memunculkan kesan bahwa tema ini menggambarkan pertumbuhan kota pada masa kolonial. Isi pameran yang ditampilkan adalah awal pertumbuhan kota kolonial. Selanjutnya adalah elemen-elemen lain sebagai pembentuk kota serta fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Belanda pada saat itu. Informasi lain adalah kehidupan sosial yang berlangsung pada saat itu.

Isi pameran yang ditampilkan pada awal pertumbuhan kota pada masa kolonial adalah pembangunan kembali benteng Ujung Pandang yang kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Elemen inilah yang menjadi elemen pertama yang memberi penegasan tentang kota Makassar sebagai kota kolonial. Fort Rotterdam pada awal pertumbuhan Makassar sebagai kota kolonial merupakan pusat pemerintahan yang dilengkapi berbagai fasilitas di antaranya tempat tinggal, kantor, barak militer, gereja bahkan dihubungkan dengan pelabuhan. Dengan fasilitas tersebut, Fort Rotterdam sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, militer, sekaligus pemukiman bagi orang-orang Belanda. Isi

pameran selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Belanda seiring dengan fungsi, peran dan status kota sebagai pusat pemerintahan Belanda di bagian timur nusantara. Isi pameran selanjutnya adalah kehidupan sosial warga kota dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dibangun tersebut.

Bentuk penyajian berupa objek yaitu peta kuno yang menggambarkan situasi Fort Rotterdam dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Objek lain adalah foto-foto kuno yang menggambarkan fasilitas kota yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Foto-foto lain yang ditampilkan adalah kondisi sosial warga serta foto-foto yang menggambarkan aktivitas warga kota pada masa tersebut. Pada setiap foto yang ditampilkan cukup memberi label berupa nama bangunan dan tahun pendirian serta tahun pembuatan foto tersebut. Tema ini perlu memberi narasi singkat tentang kondisi umum kota Makassar pada masa kolonial sebagai pengantar. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah foto-foto yang menggambarkan keadaan dan kondisi kota, ditampilkan secara berimbang antara penduduk asli dan warga keturunan. Hal ini karena fasilitas kota yang dibangun tentunya lebih dikhususkan untuk kepentingan Belanda pada saat itu sehingga terdapat beberapa pemisahan antara penduduk asli dan warga keturunan asing. Salah satu contohnya adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengadilan yaitu *Raad van Justite* yang dibangun bertolak belakang dengan *Landraad*.

#### **5.2.4 Makassar Membentuk NKRI**

Secara umum tema ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang masa peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, penamaan tema ini tentunya memberi pemahaman tentang peran Makassar baik pada masa Kerajaan Gowa-Tallo maupun pada masa peralihan setelah kemerdekaan. Isi pameran yang ditampilkan adalah peran Makassar dalam menyatukan wilayah-wilayah lain di sekitarnya pada masa Kerajaan Gowa-Tallo. Peran Makassar pada masa kemerdekaan yaitu sebagai pusat Pemerintahan Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Isi pameran yang lain adalah peran Makassar sebagai lokasi perjanjian yang kemudian menghasilkan keputusan tentang penyatuan Republik Indonesia serta perjanjian perdamaian untuk mengatasi konflik yang terjadi di Maluku dan Poso.

Isi pameran yang ditampilkan adalah memberi pemahaman tentang peran Makassar sebagai simpul pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman awal sebagai pengantar adalah peran Makassar pada masa Kerajaan Gowa-Tallo yang menyatukan daerah-daerah lain di sekitarnya khususnya wilayah timur nusantara. Demikian halnya, pasca perang Makassar yang melibatkan para penguasa lokal yang kemudian menjadi pemicu utama yang menyebabkan orang-orang Bugis-Makassar baik dari kalangan bangsawan maupun kalangan lain untuk merantau ke daerah-daerah lain di Nusantara. Perantauan orang-orang Bugis-Makassar khususnya kalangan pedagang berlanjut pada masa kekuasaan Belanda, dan kota Makassar pada saat itu menjadi titik pemberangkatan menuju ke daerah-daerah perantauan. Pemahaman selanjutnya adalah peran Makassar sebagai pusat pemerintahan Negara Indonesia Timur pada tahun 1945-1946 dan pusat pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950-1951. Informasi ini memberi pemahaman tentang masa peralihan menuju penyatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemahaman ini diakhiri dengan informasi tentang Perjanjian Malino. Meskipun lokasi perjanjian tidak berlangsung di Kota Makassar yaitu di luar kota, akan tetapi ide awal tentang perjanjian tersebut telah mempertimbangkan Makassar sebagai lokasi yang representatif dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan, penyajian ini dimaksudkan sebagai pemahaman untuk memberikan gambaran tentang peran Makassar sebagai bagian dari historiografi dalam konteks sejarah nasional. Isi pameran selanjutnya adalah peran Makassar sebagai lokasi perjanjian perdamaian untuk mengatasi konflik yang terjadi di Maluku dan Poso.

Bentuk penyajian berupa narasi yang menjelaskan isi pameran. Khusus pada penyajian tentang peran Makassar sebagai lokasi Perjanjian Malino, selain menampilkan narasi yang menjelaskan isi pameran penyajian juga menampilkan diorama yang menggambarkan situasi perundingan pada saat itu. Demikian halnya penyajian tentang informasi perjanjian untuk mengatasi konflik Maluku dan Poso disertai dengan foto yang menggambarkan situasi konflik di kedua daerah. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung tidak sekadar memperoleh informasi tentang bagaimana perjanjian tersebut berlangsung, akan tetapi dapat memaknai kedua peristiwa konflik tersebut.



Foto 5.5 Salah Satu Bentuk Penyajian Diorama Museum Bank Indonesia  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2010

### 5.2.5 Perluasan Wilayah dan Arus Urbanisasi

Tema ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang proses perkembangan wilayah Kota Makassar serta proses urbanisasi. Dengan demikian, isi pameran diawali dengan informasi tentang perubahan wilayah baik pada masa Kerajaan Gowa-Tallo maupun pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Selanjutnya adalah informasi tentang proses urbanisasi yang menyertai perkembangan kota.

Isi pameran tentang proses pembentukan dan perluasan wilayah Kota Makassar dimulai dengan informasi bahwa wilayah Kota Makassar yang ada saat ini adalah bagian dari wilayah dua kerajaan kembar yaitu Gowa-Tallo. Wilayah Kerajaan Gowa berpusat di Sombaopu di sekitar sungai Jeneberang di bagian selatan dan Kerajaan Tallo yang berpusat di sekitar sungai Tallo di bagian utara. Pada masa tersebut wilayah Kota Makassar yang ada saat ini terdiri atas gugusan benteng serta beberapa pemukiman (kampung) di daerah pesisir dan daerah yang tidak jauh dari garis pantai dan membentang dari sungai Jeneberang di selatan dan sungai Tallo di utara. Wilayah ini kemudian mengalami perubahan dengan perpindahan pusat kekuasaan di benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) yang dikuasai oleh Belanda (VOC). Proses pembentukan dan perluasan wilayah kota kemudian memasuki babak baru yang ditandai dengan penetapan Makassar sebagai daerah otonom, yaitu dengan adanya *Decentralisatiewet 1903*. Penetapan tersebut diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg di Batavia, dan pada tahun 1906 kota Makassar ditetapkan *Gemeente van Makassar*. Penetapan Makassar

sebagai daerah otonom dimungkinkan dengan kondisi yang relatif aman pada saat itu sejak adanya pembaruan perjanjian Bungaya pada tahun 1824. Status *Gemeente* sekaligus menetapkan wilayah administratif kota Makassar meliputi 6 distrik yaitu Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan Mariso. Dengan demikian, penetapan status *Gemeente* sekaligus merupakan penegasan terhadap pembentukan wilayah administratif Kota Makassar. Perluasan wilayah administratif kemudian terjadi pada masa kemerdekaan yaitu pemerintahan Walikota H.M. Pattompo pada tahun 1971. Keluarnya penetapan PP Nomor 51/1971 tentang perluasan wilayah administratif yang sebelumnya hanya 21 km<sup>2</sup> menjadi 175 km<sup>2</sup>. Perluasan wilayah tersebut terdiri atas wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari tiga Pemerintah Kabupaten yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan. Penyajian informasi tentang perluasan wilayah ini penting memperhatikan dasar kebijakan dan faktor yang melatari perluasan wilayah tersebut. Pemahaman pada informasi tentang perluasan wilayah bahwa perkembangan kota membutuhkan ruang yang lebih. Pemahaman lain bahwa penetapan wilayah administratif sebagai penegasan terhadap terbentuknya sebuah kota berdasarkan aspek administratif wilayah. Isi pameran selanjutnya adalah proses urbanisasi yang mengikuti perkembangan kota. Informasi pada isi pameran ini adalah peningkatan jumlah penduduk seiring dengan perkembangan kota serta faktor-faktor yang melatari peningkatan jumlah penduduk. Hal penting yang diperhatikan pada penyajian ini bahwa peningkatan jumlah penduduk, bukan variabel utama dalam proses urbanisasi itu sendiri. Informasi ini harus memperhatikan faktor-faktor yang melatari peningkatan jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut di antaranya perluasan wilayah, kesalahan pendataan pada laporan sebelumnya, wabah penyakit dan faktor-faktor penyebab lainnya. Penting pula menyajikan informasi tentang kondisi dan wilayah-wilayah kota yang menjadi tempat bermukim para pendatang.

Bentuk penyajian berupa narasi yang berisi sebuah pengantar yang menjelaskan keadaan dan kondisi kewilayahan dan demografis Makassar, baik pada masa Kerajaan Gowa-Tallo, pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Narasi berikutnya adalah pengantar tentang awal urbanisasi serta proses urbanisasi selanjutnya pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Penyajian berikutnya

berupa peta yang menggambarkan proses perluasan wilayah administratif kota Makassar. Selanjutnya adalah informasi tentang data statistik yang memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk berdasarkan laporan yang ada. Bentuk lain penyajian pada tema ini adalah informasi dalam bentuk rekaman *audio* maupun *audio-visual* yang menjelaskan tentang proses kedatangan para migran yang datang ke Kota Makassar. Informasi dimaksud terkait dengan pengalaman-pengalaman serta alasan yang mendorong mereka datang ke Kota Makassar. Sebagaimana karakteristik demografi pertumbuhan Kota Makassar menyebutkan bahwa gelombang kedatangan migran ke Kota Makassar berlangsung sekitar tahun 1945-1970, sehingga informasi tersebut masih dimungkinkan untuk diperoleh dan ditampilkan. Rekaman yang memberikan informasi tentang proses urbanisasi tidak hanya pada konteks masa lalu tetapi juga masa kini sehingga informasi tersebut mampu menjelaskan proses yang terjadi hingga saat ini.

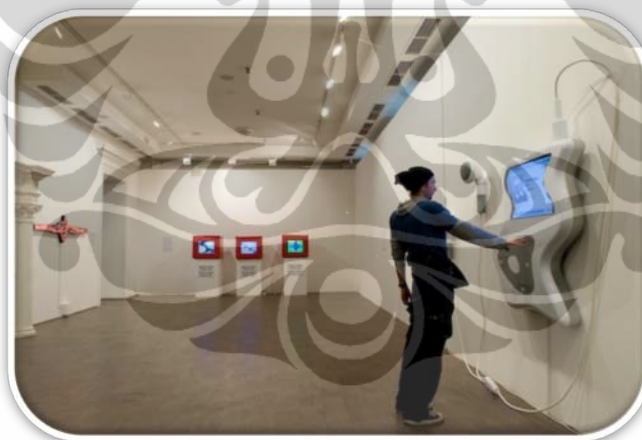


Foto 5.6 Contoh Penyajian dengan Teknologi Audio Record  
Sumber: *Image Article*, 2010

### 5.2.6 Heterogenitas Makassar

Tema ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang heterogenitas warga kota dan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya heterogenitas warga kota Makassar. Isi pameran yang ditampilkan adalah awal terbentuknya heterogenitas, etnis-etnis pendatang yang membentuk heterogenitas, dan wujud budaya yang lahir dari heterogenitas tersebut.

Isi pameran tentang awal terbentuknya heterogenitas, berisi informasi tentang kedatangan etnis-etnis lain ke kota Makassar baik pada masa Kerajaan Gowa-Tallo maupun pada masa berikutnya. Peran Makassar sebagai bandar niaga telah membuka diri terhadap kedatangan etnis lain dari nusantara bahkan dari Arab, Cina dan Eropa. Kedatangan etnis-etnis tersebut bahkan bermukim dan memiliki daerah pemukiman tersendiri, pedagang-pedagang Eropa misalnya membuka kantor dagang di sekitar benteng Sombaopu sebagai pusat pemerintahan. Informasi berikutnya adalah heterogenitas yang terbentuk pada masa kolonial. Awal terbentuknya Makassar sebagai kota kolonial telah membentuk pemukiman berdasarkan etnis, di antaranya Kampung Melayu bagi orang-orang Melayu, *Vlaardingen* bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, serta Kampung Baru bagi etnis lain di nusantara. Informasi lain adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan etnisitas tersebut, yaitu bangunan yang mencirikan etnis tertentu. Etnis Melayu misalnya membangun masjid sebagai sarana ibadah, etnis Tionghoa membangun *kjenteng*, serta orang-orang Eropa yang membangun gereja. Informasi selanjutnya adalah budaya yang terbentuk akibat heterogenitas tersebut, salah satu contoh adalah perayaan *Cap Go Meh* etnis Tionghoa yang dirayakan pula oleh etnis-etnis lain di kota Makassar.

Penyajian pada tema ini diawali dengan narasi yang menjelaskan awal terbentuknya heterogenitas, faktor-faktor yang membentuk heterogenitas tersebut. Narasi selanjutnya, berisi informasi yang menggambarkan tentang aspek-aspek yang masih bertahan hingga kini, misalnya toponim-toponim yang ada di Kota Makassar. Penyajian berikutnya adalah foto tentang bangunan-bangunan keagamaan dan perayaan *Cap Go Meh*, baik pada masa kolonial maupun saat ini. Bentuk lain adalah rekaman audio-visual tentang kegiatan-kegiatan yang pernah berlangsung, dan melibatkan etnis-etnis yang ada di Kota Makassar, misalnya perayaan *Cap Go Meh*, festival budaya, dan kegiatan-kegiatan budaya lain.

### **5.2.7 Makassar Terkini**

Tema ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi Makassar saat ini. Isi pameran yang ditampilkan adalah visi dan misi Kota

Makassar saat ini, fasilitas-fasilitas kota yang ada, serta informasi tentang aspek sosial dan budaya Kota Makassar saat ini.

Isi pameran tentang visi dan misi Kota Makassar adalah visi yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota saat ini yaitu "Mewujudkan Kompetensi Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, yang Bermartabat dan Manusiawi". Informasi lain adalah *tagline* Kota Makassar yaitu "Makassar Kota Dunia". Pemahaman yang hendak disampaikan pada isi pameran ini adalah cita-cita pembangunan dan arah pengembangan Kota Makassar di masa depan, hal ini diharapkan dapat menginspirasi warga kota untuk mencapai cita-cita tersebut. Isi pameran selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas kota yang ada saat ini, yaitu bangunan-bangunan yang berfungsi untuk menunjang kehidupan warga kota. Perkembangan Kota Makassar yang pesat saat ini melahirkan kebutuhan-kebutuhan berupa sarana dan fasilitas perkotaan yang memadai. Selanjutnya adalah informasi tentang kehidupan sosial warga kota dalam memanfaatkan sarana dan fasilitas tersebut. Informasi tentang kehidupan sosial warga kota, hendaknya mempertimbangkan bahwa penyajian yang ditampilkan harus berimbang. Penyajian yang berimbang tersebut dimaksudkan untuk menampilkan kondisi objektif atau realitas yang ada di tengah masyarakat. Diharapkan dengan adanya informasi seperti ini masyarakat memperoleh informasi berdasarkan sudut pandang yang lebih luas terhadap kondisi kekinian Kota Makassar. Kondisi kekinian dimaksud tidak hanya bentuk fisik kota tetapi sekaligus kehidupan sosial kota.

Penyajian pada tema pameran ini diawali dengan informasi berupa narasi tentang visi dan misi pembangunan Kota Makassar, serta informasi yang dapat menjelaskan arah pengembangan kota ke depan. Selanjutnya, adalah penyajian foto tentang fasilitas-fasilitas kota yang ada saat ini. Foto-foto tersebut dapat berupa foto yang memperlihatkan bangunan-bangunan yang difungsikan sebagai perkantoran, perdagangan, transportasi maupun hiburan. Dalam hal ini, penyajian foto tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pesan" bahwa fasilitas-fasilitas kota yang ada adalah upaya untuk mengarahkan pengembangan kota sesuai dengan visi pembangunan kota. Perhatian terhadap "pesan" ini tentunya memunculkan pertanyaan bahwa arah pengembangan kota tidak hanya



pada aspek fisik tetapi juga pada aspek sosial. Dengan demikian, perlu menampilkan gambaran kehidupan sosial masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota yang ada. Penyajian ini dapat berupa foto maupun karikatur yang menyampikan “pesan” berupa kritik terhadap perilaku-perilaku warga kota dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota. Contoh yang dapat dikemukakan, misalnya foto atau karikatur yang menggambarkan seorang pejalan kaki yang menyeberang tidak jauh dari “*Zebra Cross*” atau pengendara motor yang sedang menunggu lampu merah tetapi berhenti pada saat melewati batas garis jalan untuk menunggu lampu merah. Penyajian seperti ini tentunya bertujuan untuk memunculkan sikap reflektif warga kota terhadap perilaku-perilaku mereka yang kurang disiplin. Dengan demikian, secara keseluruhan bentuk penyajian ini memberi pemahaman bahwa visi pengembangan kota harus diwujudkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemahaman lain bahwa arah pengembangan kota memunculkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus dicari solusinya oleh semua pihak.

Tema tentang “Makassar Terkini” sekaligus dapat diarahkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan seni, misalnya dengan mengadakan lomba fotografi atau lomba karikatur dengan tema kekinian Makassar. Arah pengembangan lain yang dapat ditampilkan adalah melakukan kerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Makassar untuk menampilkan berbagai aktifitas mereka, tentunya yang berkaitan dengan tema kekinian dan kegiatan yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, menampilkan rekaman tentang kesan-kesan terhadap kota makassar baik warga kota maupun pendatang yang sekedar datang mengunjungi kota makassar dalam waktu singkat.

Bentuk-bentuk penyajian yang ditampilkan pada tema ini lebih diarahkan pada pameran temporer sehingga pengunjung memperoleh penyajian informasi yang berbeda. Penyajian informasi dengan bentuk pameran temporer juga dimaksudkan untuk memperbarui sajian informasi kepada pengunjung. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk menghilangkan kesan museum yang membosankan, karena pengunjung hanya memperoleh informasi yang sama pada setiap kunjungannya.

### 5.2.8 Makassar dalam Peta

Tema ini dimaksudkan untuk menampilkan pertumbuhan Kota Makassar berdasarkan aspek fisiknya. Penamaan tema ini karena kata “peta” memberi pemahaman bahwa dengan melihat peta, dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh terhadap sesuatu. Dalam hal ini, perkembangan struktur tata ruang lebih tergambar dengan jelas ketika melihat sebuah peta. Dengan demikian, isi pameran pada tema ini adalah dengan menampilkan peta yang menggambarkan perubahan struktur tata ruang Kota Makassar. Berbeda dengan tema sebelumnya tentang perluasan wilayah, tema ini lebih dititikberatkan pada struktur tata ruang yaitu pemanfaatan ruang berdasarkan fungsinya, sedangkan tema sebelumnya difokuskan pada aspek wilayah administratif.

Isi pameran yang dapat ditampilkan pada aspek perkembangan fisik kota adalah perkembangan awal Kota Makassar pada masa Kerajaan Gowa-Tallo hingga terbentuk sekarang ini. Informasi awal bahwa pemanfaatan ruang lebih terpusat di benteng Sombaopu sebagai ibukota kerajaan dan di sekitar sungai Tallo sebagai pusat Kerajaan Tallo. Daerah-daerah yang berada di antara kedua pusat kerajaan tersebut adalah gugusan benteng yang ada di daerah pesisir yang berfungsi sebagai pertahanan, dan daerah-daerah yang tidak jauh dari garis pantai yang berfungsi sebagai permukiman dan lahan persawahan. Informasi selanjutnya, perubahan signifikan kemudian terjadi ketika penaklukan Belanda (VOC) atas wilayah ini dengan merebut benteng Ujung Pandang yang berada di pusat kota saat ini dan menjadikan benteng sebagai pusat aktivitas. Periode ini dimulai dengan kehidupan *intra muros* dimana segala aktivitas berlangsung di dalam benteng, sehingga fungsi benteng tidak hanya sebagai pertahanan tetapi memiliki fungsi-fungsi lain. Perkembangan fisik kota kemudian dipengaruhi oleh hegemoni Belanda sejak perjanjian *Bungaya* (18 November 1667) hingga masa kemerdekaan. Periode ini menjadikan Kota Makassar berkembang sebagai salah satu kota kolonial di Nusantara. Pada perkembangan selanjutnya, pemanfaatan ruang menyebar ke daerah-daerah sekitar Fort Rotterdam, dimana daerah tersebut berfungsi sebagai daerah pemukiman. Perubahan terhadap pemanfaatan ruang semakin berkembang seiring kondisi keamanan yang ditandai dengan penetapan Makassar sebagai *Gemeente van Makassar*. Daerah-daerah sekitar Fort Rotterdam

tidak hanya berfungsi sebagai pemukiman, tetapi pemanfaatan ruang pada daerah tersebut dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan perdagangan, maupun fungsi-fungsi lainnya. Perubahan signifikan terhadap pemanfaatan ruang di Kota Makassar kemudian terjadi pada masa kemerdekaan dengan adanya perluasan wilayah. Ketersediaan lahan dengan adanya perluasan wilayah menjadikan pemanfaatan ruang semakin menyebar ke daerah-daerah baru ini. Pada masa selanjutnya, pemanfaatan ruang semakin berkembang mengikuti kebutuhan seiring dengan perkembangan kota yang saat ini menjadi sebuah kota metropolitan. Dengan tujuan untuk melengkapi pemahaman terhadap perkembangan pemanfaatan ruang kota, maka informasi selanjutnya adalah menyajikan informasi tentang rencana pengembangan pemanfaatan ruang atau RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Informasi yang dapat ditambahkan pada penyajian ini adalah faktor-faktor yang melatari perkembangan pemanfaatan ruang Kota Makassar. Informasi tersebut, bahwa setiap perubahan yang terjadi diawali dengan peristiwa maupun kebijakan tertentu yang melatarinya. Penyatuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo misalnya berpengaruh terhadap terbentuknya pusat aktivitas di Sombaopu, Perjanjian *Bungaya* pada tahun 1667 berdampak terhadap perpindahan aktivitas ke Fort Rotterdam. Demikian halnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda berpengaruh terhadap perkembangan pemanfaatan ruang selanjutnya. Hal yang sama terjadi pada perkembangan berikutnya yaitu perluasan wilayah dan kebutuhan atas perkembangan kota berpengaruh pula terhadap pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Penyajian informasi yang lengkap seperti ini memberi pemahaman kepada pengunjung khususnya warga kota untuk selanjutnya memberi interpretasi terhadap perkembangan pemanfaatan ruang kota.

Informasi lain adalah sejarah terbentuknya pemukiman-pemukiman yang dibentuk oleh para pendatang di Kota Makassar. Pemukiman-pemukiman yang dulu dikenal sebagai kampung, di antaranya: Kampung Wajo, Kampung Melayu, Kampung Bontoala, Kampung Arab, dan Pacinongan (Kampung Cina). Toponim-toponim tersebut bahkan masih bertahan hingga saat ini.

Selain penyajian berupa peta-peta yang menggambarkan perkembangan pemanfaatan ruang kota, agar lebih menarik maka bentuk penyajian lain berupa

penyajian audio-visual. Penyajian audio-visual ini dapat berupa film dokumenter atau dengan menggunakan program komputer yang mampu menggambarkan pemanfaatan ruang pada setiap periode perubahan.



Foto 5.7 Contoh Penyajian Audio Visual  
Sumber: *Comav Design*, 2010

### 5.2.9 Mengenang Makassar

Tema ini dimaksudkan untuk menstimulasi kenangan warga kota terhadap berbagai hal, baik tentang peristiwa maupun yang berkaitan dengan tempat atau memori terhadap ruang. Isi pameran yang ditampilkan adalah kenangan yang berkaitan dengan peristiwa dan berkaitan dengan tempat yaitu pantai Losari dan Lapangan Karebosi.

Isi pameran yang ditampilkan adalah berkaitan dengan peristiwa yang mengiringi perjalanan Kota Makassar. Peristiwa-peristiwa tersebut di antaranya “Peristiwa Korban 40.000 Jiwa” yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Peristiwa lain adalah kerusuhan pada tahun 1997 yaitu konflik horisontal antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Hal penting yang perlu diperhatikan pada penyajian ini, bahwa informasi yang ditampilkan adalah isu-isu kontroversial. Oleh karena itu, bentuk penyajian yang tepat adalah memberikan narasi yang menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut disertai dengan dampak yang terjadi. Informasi ini juga menggunakan bentuk visual baik foto maupun format video yang menggambarkan dampak peristiwa. Bentuk penyajian lain adalah dengan menggunakan *earphone* yang memperdengarkan kesaksian-kesaksian warga kota yang mengalami peristiwa tersebut. Bentuk penyajian lain

adalah menampilkan informasi dalam bentuk “*mading*” (majalah dinding) yaitu guntingan koran yang memberitakan peristiwa-peristiwa tersebut. Tentunya dengan memilih sumber-sumber berita berisi informasi yang berimbang tanpa memihak dan tidak provokatif. Penyajian pada unsur tema ini diharapkan dapat menggugah warga kota tentang akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Selain itu, unsur tema ini memberi inspirasi pada pengelola museum untuk lebih melibatkan masyarakat dalam penyajian pameran museum. Hal ini sebagaimana dicontohkan pada “*Museum of London*” dalam menampilkan peristiwa “Kerusuhan Brixton” pada April 1981. Dalam hal ini, pengelola museum membuat sebuah program yang disebut “*Community Exhibition and Project*” yang diperuntukkan bagi warga kota untuk menampilkan berbagai kenangan yang berkaitan dengan peristiwa yang pernah terjadi di kotanya.

Informasi lain pada tema ini adalah kenangan yang berkaitan dengan tempat atau ruang. Pilihan terhadap tempat atau *landmark* perkotaan adalah pantai Losari dan Lapangan Karebosi. Kedua *landmark* Kota Makassar tersebut masing-masing memiliki kesan tersendiri bagi warga kota. Bentuk penyajian menampilkan narasi yang berisi informasi tentang sejarah kedua lokasi tersebut, pemanfaatan dan kondisi terkini. Bentuk penyajian lain menampilkan foto yang menggambarkan situasi dan keadaan kedua lokasi tersebut dari masa ke masa.

Tema ini dapat diarahkan pada penyajian pameran temporer sehingga pengunjung memperoleh sajian yang berbeda-beda pada setiap kunjungannya. Penyajian pada tema ini, sekaligus memberi peluang kepada warga kota untuk menyajikan koleksi-koleksi mereka berkaitan dengan tema yang telah ditentukan oleh pengelola museum.



Foto 5.8 Contoh Penyajian Bentuk Majalah Dinding (*Mading*)  
Sumber: Coal Buncers, 2010



Foto 5.9 Contoh Penyajian Foto dilengkapi dengan Narasi  
Sumber: Fountain Hills Chamber, 2010



Foto 5.10 Bentuk Penyajian Museum Bank Indonesia  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2010

### 5.3 Tinjauan Terhadap Konstruksi Baru Pameran

Berdasarkan konstruksi baru pameran yang dihasilkan sebagaimana pembahasan sebelumnya, beberapa aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- a. Museum Kota Makassar harus melakukan revisi terhadap visi dan misi disesuaikan dengan objektif berdasarkan definisi dan peran museum kota. Perubahan terhadap objektif dan prinsip dasar tersebut sekaligus mengarahkan museum pada pemahaman bahwa koleksi adalah keseluruhan warisan, bangunan adalah keseluruhan wilayah, dan masyarakat adalah keseluruhan populasi;
- b. Museum Kota Makassar harus berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pemerintah Kota Makassar untuk memosisikan lembaga museum sebagai institusi yang mandiri terhadap pengelolaannya;
- c. Museum Kota Makassar lebih aktif melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian maupun sumber-sumber informasi. Hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber informasi dimaksud adalah berkaitan dengan pameran yang akan disajikan untuk kemudian menyajikannya dalam bentuk pameran. Hal ini, dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola museum untuk mengadakan penelitian. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa setiap

penyajian informasi pada pameran harus menyertakan sumber informasi, agar fungsi museum sebagai tempat penelitian lebih optimal.

- d. Konstruksi baru yang dihasilkan (secara singkat dapat dilihat pada tabel 5.1), setidaknya memiliki beberapa aspek, di antaranya: pameran lebih informatif, terdapat penegasan tema, mampu menjelaskan perubahan kota baik aspek sosial maupun fisiknya, mampu memberi semangat reflektif terhadap warga kota, mampu menampilkan tema masa lalu dan kekinian, dan orientasi pameran tidak hanya pada sejarah pemerintahan tetapi lebih berorientasi pada aspek sosial warga kota.
- e. Perencanaan jangka panjang, konstruksi baru yang telah dibahas dapat diarahkan pada pendirian museum di lokasi tertentu untuk menyajikan informasi yang lebih spesifik. Salah satu contoh adalah informasi tentang awal pertumbuhan Kota Makassar difokuskan di benteng Sombaopu sebagai ibukota Kerajaan Gowa-Tallo. Demikian halnya, informasi tentang perdagangan masa lalu dan kehidupan bahari difokuskan di pelabuhan Paotere sebagai pelabuhan rakyat yang masih digunakan hingga saat ini. Museum Kota Makassar sendiri dapat diarahkan pada informasi khusus tentang perkembangan Kota Makassar pada masa kolonial. Dengan demikian, museum-museum tersebut lebih kontekstual karena berada di lokasi yang sesuai dengan penyajian informasinya. Perencanaan jangka panjang ini membuka kesempatan bagi Museum Kota Makassar untuk menerapkan karakter desentralistik yaitu memperluas ruang lingkup, dengan membuka beberapa cabang sesuai dengan karakteristik perkembangan kota.